



**PENENTUAN PRIORITAS SEKTOR DALAM PEMBANGUNAN REGIONAL
DI KABUPATEN SUMEMEP (PENERAPAN ANALISIS INPUT OUTPUT)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi
Universitas Jember

Asal:	Haliah	Klass
	Finalian	228.959.87
Oleh	Terima Tgl : 27 FEB 2002	Har 24/4
	No. Induk : 0373	P
KLASIR / PENYALIN:		

Ahmad Halimy
NIM : 980810101063

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER
2002**

JUDUL SKRIPSI

PENENTUAN PRIORITAS SEKTORAL DALAM PEMBANGUNAN
REGIONAL DI KABUPATEN SUMENEP (PENERAPAN ANALISIS INPUT OUTPUT)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

N a m a : AHMAD HALIMY

N. I. M. : 980810101063

Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

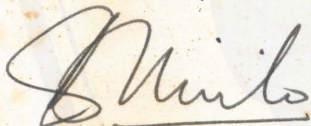
telah dipertahankan di depan Panitia Penguji pada tanggal :

02 PEBRUARI 2002

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh gelar S a r j a n a dalam Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji


Ketua,



Drs. J. Sugiarto, SU

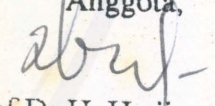
NIP. 131 610 494

Sekretaris,

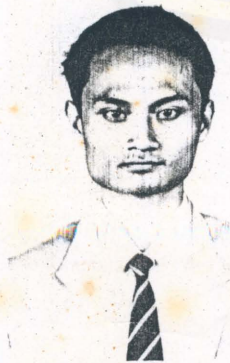

Dra. Anifatul Hanim

NIP. 131 953 240

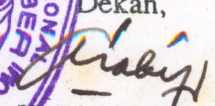
Anggota,


Prof. Dr. H. Harijono, SU

NIP. 130 350 765



Mengetahui/Menyetujui
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi
Dekan,


Drs. H. Liakip, SU

NIP. 130 531 976

TANDA PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Penentuan Prioritas Sektoral dalam Pembangunan Regional di Kabupaten Sumenep (Penerapan Analisis Input Output)

Nama Mahasiswa : Ahmad Halimy

N I M : 980810101063

Jurusan : Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan

Konsentrasi : Ekonomi Perencanaan dan Industri

Pembimbing I



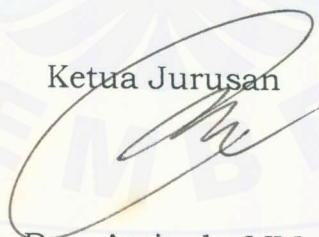
Prof. Dr. H. Harijono, SU. Ec.
130 350 765

Pembimbing II



Teguh Hadi Priyono, SE. M. Si.
132 092 300

Ketua Jurusan



Dra. Aminah, MM
130 676 291

Tanggal Persetujuan : 25 Januari 2002

HALAMAN MOTTO

Labbaik allahumma labbaik

Labbaika La Syariika Laka Labbaik

Inna al-Hamd wa an-Ni'mah Laka wa al-Mulk

Labbaik La Syariika Lak

Ya Allah

Kami penuhi panggilan-MU.

Kami penuhi (dengan segenap jiwa dan raga)

Kami penuhi panggilan-MU. Tak Ada sekutu bagi-MU

Sungguh Segala Puji adalah milik-MU.

Sungguh segala ni'mat adalah milik-MU

Sungguh segala Kuasa adalah milik-MU

Kami penuhi panggilan-MU. Tak ada sekutu bagi-MU

(doa pengantar Ayah ke tanah suci. Semoga Menjadi Haji Mabru)

Itulah kampung akhirat, kami peruntukkan bagi mereka yang tidak menginginkan kedudukan yang tinggi di bumi, juga tak menghendaki kerusakan. Dan akhir yang baik adalah untuk mereka yang bertaqwa

(Qur'an Karim)

Janganlah sombong sahabatku. Jangan merendahkan orang, dan jangan menolak kebenaran dari manapun datangnya. Belajarlah mendengar. Allah akan mengangkat mereka yang rendah hati karena-NYA, dan merendahkan mereka yang tinggi hati.

(Pesan Seorang Sahabat)

ABSTRAKSI

Salah satu permasalahan penting dalam pembangunan perekonomian wilayah adalah penentuan dan pemilihan sektor prioritas yang akan menjadi lokomotif pengembangan wilayah. Berbagai aspek harus dipertimbangkan secara baik dalam pengembangan sektor prioritas ini, agar kebijakan pengembangan sektoral memiliki relevansi dengan tujuan pembangunan secara regional. Faktor-faktor yang patut dipertimbangkan dalam penentuan sektor-sektor prioritas dalam pengembangan wilayah antara lain derajat keterkaitan sektor tersebut dengan sektor-sektor lain dalam perekonomian wilayah, dampak pengganda (*multiplier effect*) yang ditimbulkan oleh satu satuan investasi pada sektor tersebut dan tingkat kebocoran wilayah sektor tersebut.

Hasil penelitian membuktikan bahwa sektor-sektor prioritas dalam pembangunan regional di Kabupaten Sumenep berdasarkan keterkaitan yang ditunjukkan dengan nilai kepekaan penyebaran lebih dari satu, adalah untuk sektor angkutan dan komunikasi (2.3183), sektor pertanian (1.9878) dan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan (1.6927).

Sedangkan berdasarkan keterkaitan ke belakang, sektor-sektor prioritas dalam pembangunan regional di Kabupaten Sumenep yang ditunjukkan dengan nilai koefisien penyebaran lebih dari satu, adalah sektor angkutan dan komunikasi (2.14612), sektor jasa (1.96406), sektor pertanian (1.61725) dan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan (1.2428).

Berdasarkan angka pengganda output, sektor-sektor prioritas adalah sektor bangunan (2.03), sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan (1.79), sektor angkutan dan komunikasi (1.64), sektor industri pengolahan (1.57) dan sektor listrik, gas dan air minum (1.55). Sedangkan berdasarkan pengganda pendapatan, sektor-sektor yang menonjol adalah sektor bangunan (2.64), sektor industri pengolahan (1.62), sektor angkutan dan komunikasi (1.62), sektor perdagangan, hotel dan restoran (1.50) dan sektor listrik, gas dan air minum (1.50).

Berdasarkan kebocoran wilayah, sektor-sektor prioritas adalah sektor pertambangan dan penggalian (0.0019), sektor pertanian (0.0133) dan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan (0.0233).

Penelitian ini masih merupakan kajian awal yang harus ditindaklanjuti untuk menetapkan kebijakan pengembangan sektoral dalam kerangka pembangunan regional di Kabupaten Sumenep, termasuk untuk menetapkan fokus kebijakan pada komoditas-komoditas unggulan.

Kata Kunci : prioritas sektoral, derajat keterkaitan, dampak pengganda, kebocoran wilayah

KATA PENGANTAR

Alhamdu lillah, segala puji adalah milik Allah semata.

Shalawat dan salam terhatur pada junjungan kekasih mulia: Muhammad Rasulullah, para keluarga, sahabat dan semua Rasul, Nabi dan Wali Allah serta ummat beliau hingga akhir zaman nanti.

Setiap karya adalah sumbangan dari banyak pihak, hasil kontribusi dari berbagai kalangan. Skripsi sederhana ini bukanlah termasuk perkecualian. Karena itu, penulis dengan segala ketulusan yang dapat dikumpulkan dalam hati saat ini ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. DR. H. Harijono, SU.Ec., selaku pembimbing I, dan Bapak Teguh Hadi Priyono, SE. M.Si., selaku pembimbing II, atas bantuan, dorongan dan waktu yang diberikan selama proses penulisan skripsi ini.
2. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember, Bapak Drs. H. Liakip, SU.
3. Ketua dan Sekretaris Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan (IESP) Fakultas Ekonomi Universitas Jember, Ibu Dra. Aminah, MM. dan Bapak Drs. Sunlip Wibisono, M.Kes.
4. Bapak Prof. DR. H. Harijono, SU.Ec., selaku dosen wali atas bimbingan beliau selama penulis menjalani proses kuliah.
5. Segenap dosen Jurusan IESP FE Universitas Jember.
6. Para Guru Hidup-ku : Kakekku KHR. Abd.Mu'min Chanafi, KH. Busyairi, Pak Win, Mas Djas. Pak Mukhsin, Pak Ridwan.
7. Arek-arek SP – GL '98 atas kebersamaan dan persahabatannya.
8. Sahabat-sahabat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon FE Univ. Jember.
9. Rekan-rekan di Dewan Perwakilan Mahasiswa FE UNEJ 2000/2001 dan di Lembaga Studi Islam dan Lingkungan FE UNEJ.

10. Keluarga Pak Miski dan Mas Kandar yang selama hampir empat tahun telah menerima penulis sebagai bagian dari keluarga di Jember.
11. Penghuni Jawa VIA/59, Halmahera I/21 dan Halmahera I/19.
12. Kakak-kakakku di Jember : Mas Muksin, Mas Heru, Mas Syamsu, Mas Jun, Mas Win, Mas Heri dan Mbak Evi,. Terima kasih atas pelajarannya.
13. Sahabat-sahabat terbaik : Fauzi, Ali, Mas Eko, Emi, Aji, Asef. Terima kasih atas kebersamaannya.
14. Sahabat-sahabat pengurus : Halim, Imam, Ibnu, Deka, Tri, Yati. Irma, Tina dan Bowo (titip HMJ, teruslah maju)
15. Adik-adikku : Dwi dan Ayuk, Helmik, Nunung dan Wiwik. Terima kasih untuk segalanya.
16. Nama-nama yang dengan segala permohonan maaf, tak tersebutkan.

Semoga kebaikan selalu bersama kita semua. Semua kedamaian selalu bersama kita semua. Semoga Kebenaran akan selalu bersama kita semua, dari saat ini hingga saat kita semua mati dan saat hidup setelah mati.

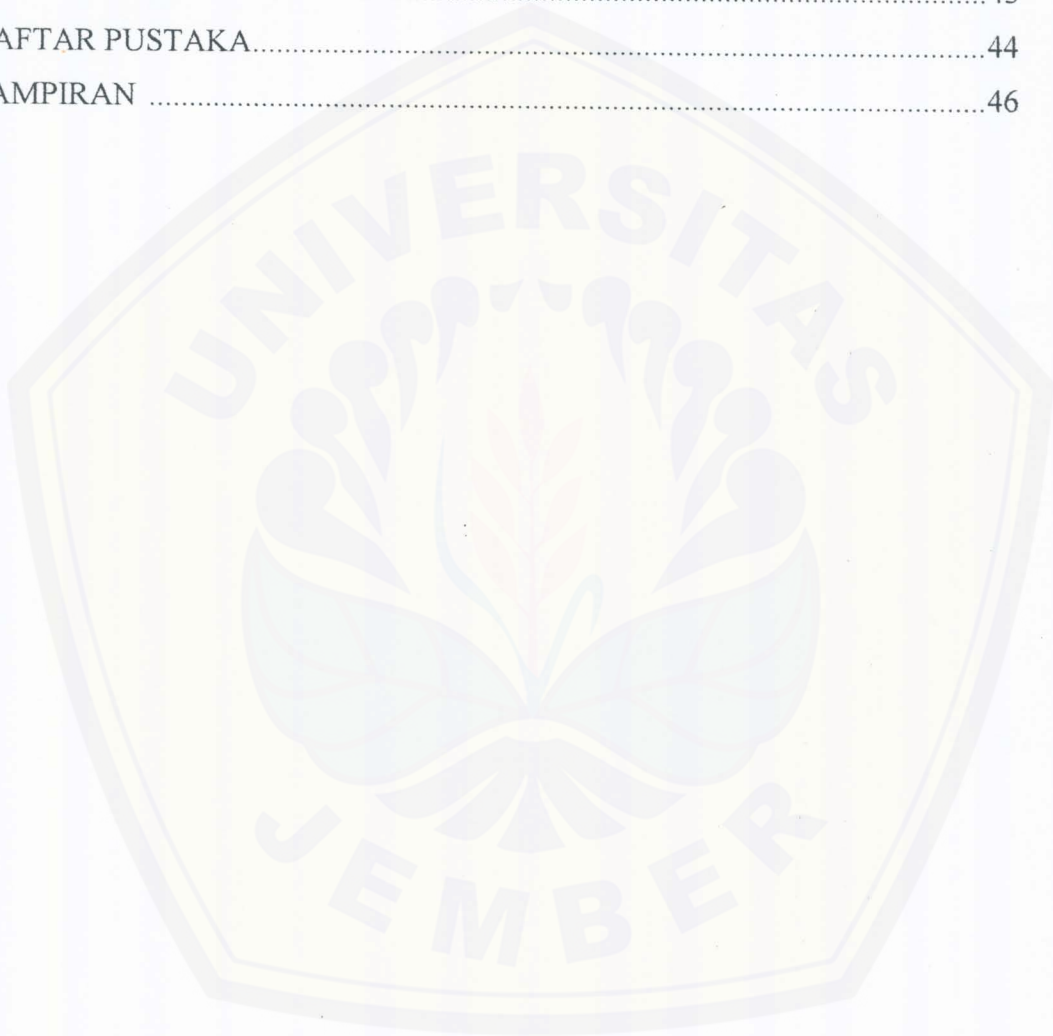
Jember, 2. Februari 2002

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAKSI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Permasalahan.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	5
2.1 Hasil Penelitian Sebelumnya.....	5
2.2 Landasan Teori.....	5
III. METODE PENELITIAN.....	15
3.1 Rancangan Penelitian.....	15
3.2 Metode Pengumpulan Data.....	15
3.3 Metode Analisis Data.....	15
3.4 Definisi Variabel Operasional dan Pengukurannya.....	24
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	25
4.1 Gambaran Umum Daerah Penelitian.....	25
4.2 Analisis Data dan Pembahasan.....	32

V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	42
5.1 Kesimpulan.....	42
5.2 Saran.....	43
DAFTAR PUSTAKA.....	44
LAMPIRAN	46



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
3.1 Bentuk Umum Tabel Input Output.....	16
4.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Sumenep berdasarkan Usia dan Tingkat Pendidikan (2000).....	26
4.2 Jumlah Penduduk Kabupaten Sumenep yang bekerja berdasarkan Lapangan Kerja Utama (2000).....	27
4.3 PDRB Kabupaten Sumenep atas dasar harga konstan 1993	28
4.4 PDRB Propinsi Jawa Timur atas dasar harga konstan 1993..	30
4.5 Laju Pertumbuhan PDRB Propinsi Jawa Timur dan Kabupaten Sumenep 1998-1999	31
4.6 PDRB Per Kapita per Tahun Propinsi Jawa Timur dan Kabupaten Sumenep	32
4.7 Koefisien Keterkaitan Langsung dan Tidak Langsung Sektor-sektor Perekonomian Kabupaten Sumenep.....	33
4.8 Koefisien Pengganda Output pada Perekonomian Kabupaten Sumenep ...	35
4.9 Koefisien Pengganda Pendapatan pada Perekonomian Kabupaten Sumenep	36
4.10 Koefisien Penyebaran Sektor-sektor Perekonomian Kabupaten Sumenep	38
4.11 Kepekaan Penyebaran Sektor-sektor Perekonomian Kabupaten Sumenep	39
4.12 Koefisien Impor Sektor-sektor Perekonomian Kabupaten Sumenep	40

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN	HALAMAN
1. Klasifikasi Sektor Tabel Input Output Kabupaten Sumenep Tahun 2000	46
2. Tabel Input Output Propinsi Jawa Timur 1995.....	47
3. Tabel Input Output Kabupaten Sumenep Berdasarkan Harga Berlaku Tahun 2000.....	49





BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Salah satu aspek penting dalam perencanaan pembangunan ekonomi di Indonesia adalah perencanaan pembangunan regional. Sebagai sebuah negara yang memiliki pola persebaran spasial dan geografis yang luas dengan potensi daerah yang bersifat heterogen, perhatian terhadap pengembangan regional merupakan satu hal yang amat penting. Pengembangan regional dalam hal ini meliputi dua aspek yang saling terkait, yaitu pengembangan untuk mengatasi masalah-masalah regional yang bersifat unik dan kedua, pengembangan potensi-potensi lokal dalam kerangka pembentukan spesialisasi daerah (Tjokroamidjojo, 1986:130)

Pada saat ini, pembangunan regional di Indonesia memasuki tahapan baru yang amat menentukan, tidak hanya bagi pengembangan potensi ekonomi daerah semata namun juga berpengaruh terhadap konfigurasi perekonomian nasional di masa yang akan datang. Hal ini ditandai dengan disahkannya UU No. 25 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, menggantikan UU. No. 5 Tahun 1974 dan UU No. 5 Tahun 1991. Pada sisi pengembangan regional, proses desentralisasi yang ditandai dengan pengesahan kedua UU ini diharapkan akan dapat meningkatkan efektivitas kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan potensi-potensi lokal untuk kesejahteraan masyarakat daerah. Di sisi lain, desentralisasi diharapkan akan memunculkan kutub-kutub pertumbuhan baru (*growth poles*) yang bisa memicu dan memacu pertumbuhan perekonomian nasional.

Dalam kerangka pengembangan daerah di era otonomi ini, daerah harus memiliki perencanaan pembangunan regional yang matang dan didasarkan pada potensi yang dimiliki (*resource based*). Perencanaan regional ini mencakup perencanaan investasi dan penentuan prioritas sektoral yang akan dikembangkan. Penentuan prioritas sektoral ini penting untuk membentuk kompetensi daerah dalam persaingan dengan daerah luar, dan juga untuk meningkatkan efisiensi investasi.

Dengan demikian, di masa yang akan datang, diharapkan setiap kabupaten di Indonesia dapat memiliki paling tidak satu kompetensi inti yang menjadi andalan dan penentu utama daya saing daerah. Konsep kompetensi inti ini pada dasarnya adalah upaya untuk mempersiapkan infrastruktur yang kuat, dengan mendasarkan diri pada pemetaan geografis (*geographical mapping*) yang baik untuk mengetahui potensi-potensi daerah yang dapat dikembangkan. (Husseini, 2000).

Perencanaan dan pemetaan ini tentu saja membutuhkan teknik analisis ekonomi yang memadai untuk mengetahui keunggulan komparatif (*comparative advantage*) dan keunggulan bersaing (*competitive advantage*) yang dimiliki daerah. Keunggulan ini dapat dikembangkan dalam perencanaan sektoral dengan menentukan sektor-sektor unggulan yang bisa menjadi lokomotif perkembangan perekonomian daerah. Dalam kerangka ini, regionalisasi analisis ekonomi menjadi tuntutan yang harus semakin dikembangkan di masa yang akan datang (Aziz, 1994:149)

Secara ekonomis, sektor unggulan yang dipilih harus memiliki struktur, perilaku dan kinerja yang baik. Dari sisi struktur, sektor tersebut harus memiliki derajat keterkaitan yang relatif paling tinggi dibanding sektor yang lain, baik keterkaitan ke depan (*forward linkage*) maupun keterkaitan ke belakang (*backward linkage*). Selain itu, tingkat konsentrasi sektor tersebut harus rendah, untuk mencapai tingkat pemerataan hasil pembangunan yang dapat dinikmati oleh sejumlah besar penduduk daerah. Dari sisi perilaku, sektor unggulan adalah sektor yang memiliki dampak pengganda (*multiplier effect*) yang paling besar, baik terhadap output, pendapatan maupun terhadap penyerapan tenaga kerja. Sedangkan kinerja sektor tersebut dapat dinilai berdasarkan derajat ketergantungan ekspor serta dampak pengganda ekspor terhadap output dan tenaga kerja (Kuncoro, 1996)

Paparan di atas menunjukkan pentingnya prioritas sektoral dalam perencanaan regional serta gambaran tentang sektor unggulan yang dapat diandalkan sebagai penggerak roda perekonomian suatu daerah. Untuk itu, proses identifikasi harus dilakukan. Identifikasi ini sangat dibutuhkan untuk menentukan kebijakan-kebijakan

pembangunan sektoral yang akan diterapkan serta memperkirakan dampak-dampak yang akan ditimbulkan oleh kebijakan tersebut.

Kabupaten Sumenep sebagai salah satu daerah yang melaksanakan otonomi daerah juga perlu melakukan identifikasi terhadap berbagai potensi sektoral yang dimiliki, untuk kemudian menentukan alternatif pengembangannya. Sebagai sebuah daerah agraris, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Sumenep masih didominasi oleh kontribusi sektor pertanian. Antara tahun 1997 hingga tahun 1999, pangsa sektor pertanian masih merupakan yang terbesar, yaitu 39,44 %, 49,60 % dan 49,60 % terhadap keseluruhan PDRB. Selain sektor pertanian, sektor lain yang memberikan sumbangan besar pada PDRB adalah sektor pertambangan, berturut-turut 21,67 %, 22,29 % dan 18,53% dari keseluruhan PDRB (Bappeda dan BPS Kabupaten Sumenep, 2000:29).

Angka-angka di atas masih perlu diolah dan dikaji lebih lanjut untuk menentukan prioritas sektoral yang akan dipilih. Hal ini karena prioritas sektoral harus memiliki prospek jangka panjang yang cerah, lebih daripada sekedar keunggulan jangka pendek. Aspek-aspek lain seperti keterkaitan sektoral masih memerlukan analisis dan kajian lebih lanjut.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan, telah dipaparkan bahwa identifikasi sektor unggulan merupakan bagian penting dalam perencanaan regional, terutama dalam rangka Otonomi Daerah. Dalam penelitian ini, sektor unggulan hanya akan dilihat dari dua kriteria, yaitu derajat keterkaitan dan dampak pengganda sektoral yang ditimbulkan. Permasalahan yang menjadi kajian dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. sektor apakah yang mempunyai derajat keterkaitan terbesar, baik keterkaitan ke depan (*forward linkage*) maupun keterkaitan ke belakang (*backward linkage*);
2. sektor apakah yang memiliki dampak pengganda (*multiplier effect*) paling besar terhadap output dan terhadap pendapatan;

3. sektor apakah yang memiliki tingkat kebocoran wilayah terkecil dalam perekonomian wilayah di Kabupaten Sumenep.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. sektor unggulan Kabupaten Sumenep dilihat dari derajat keterkaitan sektor tersebut dengan sektor-sektor lain;
2. sektor unggulan Kabupaten Sumenep berdasarkan besar kecilnya dampak pengganda yang ditimbulkan terhadap output dan terhadap pendapatan;
3. sektor unggulan Kabupaten Sumenep berdasarkan tingkat kebocoran wilayah yang dimiliki.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. sebagai sumbangan bagi pengembangan ilmu ekonomi dan studi pembangunan, khususnya yang berkait dengan ekonomi regional;
2. sebagai masukan bagi pengambil kebijakan, khususnya Pemerintah Kabupaten Sumenep;
3. sebagai bahan masukan bagi penelitian lanjutan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hasil Penelitian Sebelumnya

Beberapa studi tentang keterkaitan antar sektor telah banyak dilakukan, baik pada tingkat nasional ataupun pada tingkat regional. Di antara studi-studi tersebut ada yang mengkaji keterkaitan antar sektor secara umum dan melibatkan keseluruhan sektor dalam perekonomian, dan ada pula yang mengkhususkan penelitiannya pada sektor-sektor tertentu.

Pada tingkat regional, studi keterkaitan antar sektor misalnya pernah dilakukan Saktiyanto (2000) dengan judul Analisis Keterkaitan Antar Sektor di Kabupaten Jember. Studi ini mencoba menganalisis penentuan sektor unggulan dari tabel input output berdasarkan daya persebaran, derajat kepekaan, rasio permintaan antara dan rasio input antara. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa sektor perkebunan tembakau dan sektor konstruksi merupakan sektor unggulan yang patut dijadikan prioritas dalam pembangunan sektoral. Sektor perkebunan tembakau memiliki daya persebaran sebesar 1,3619 dan derajat kepekaan sebesar 1,3641, sedangkan sektor konstruksi memiliki daya persebaran sebesar 1,0396 dan derajat kepekaan sebesar 1,9189.

Studi yang lain pernah dilakukan oleh Junaedi (1997) yang mengkhususkan diri pada keterkaitan komoditi primer dan sektor agroindustri di Kabupaten Jember, dengan menggunakan derajat keterkaitan antar sektor baik ke depan (*forward linkage*) maupun ke belakang (*backward linkage*). Keterkaitan ke depan untuk komoditas primer berkisar antara 1,042705 – 2,66590, dan untuk sektor agroindustri berkisar antara 1,033922 – 1, 950132. Keterkaitan ke belakang untuk kedua sektor tersebut berturut-turut berkisar antara 1, 671317 – 2,58479 dan 1, 147854 – 2,045834. Hasil ini menunjukkan adanya keterkaitan yang cukup tinggi antara komoditas primer dan sektor agroindustri di Kabupaten Jember.

Penelitian keterkaitan antar sektor juga pernah dilakukan oleh Kuncoro (1996) untuk melihat struktur, perilaku dan kinerja sektor agroindustri di Indonesia. Penelitian ini mencoba untuk melihat keterkaitan dari sektor hulu, sektor antara dan industri hilir yang terlibat dalam pengembangan agroindustri di Indonesia. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa subsektor agroindustri yang memiliki derajat keterkaitan yang tinggi baik ke depan maupun ke belakang adalah karet, industri pemintalan, industri barang dari kertas, industri pupuk dan pestisida, industri barang dari karet dan plastik dan industri barang dari logam. Industri-industri ini juga memiliki angka pengganda output yang tinggi, berturut-turut untuk karet (2,76), industri pemintalan (2,73), industri barang dari kertas (3,02), industri pupuk dan pestisida (2,71), industri barang dari karet dan plastik (2,76) dan industri barang dari logam (2,94).

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pembangunan Wilayah

Pembangunan ekonomi pada dasarnya merupakan sebuah usaha untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, baik sebagai individu maupun sebagai sebuah masyarakat dan bangsa. Pemahaman ini mengandung implikasi bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh faktor pertambahan jumlah barang dan jasa seperti yang terlihat dalam paradigma pertumbuhan, namun juga mencakup pemenuhan rasa keadilan masyarakat melalui distribusi penghasilan (*income distribution*) dan pemerataan kesempatan.

Dalam kerangka ini, sebuah strategi pembangunan yang dikembangkan harus memiliki dasar pijak kewilayahan (*regional*) yang kuat. Strategi pembangunan wilayah yang digunakan harus mampu meningkatkan kemampuan wilayah untuk berkembang secara mandiri dan otonom. Hal ini menghasilkan beberapa keuntungan. Pertama, terbentuknya pusat-pusat pertumbuhan baru yang akan mempercepat laju pertumbuhan secara nasional. Kedua, penguatan struktur perekonomian nasional karena memiliki persebaran pusat pertumbuhan yang akan mengurangi resiko yang

disebabkan oleh sentralisme kekuatan ekonomi. Ketiga, memenuhi rasa keadilan dengan adanya pemerataan pembangunan dan pengurangan kesenjangan ekonomi antara pusat dan daerah. Keempat, peningkatan efektivitas kebijakan ekonomi dan pelayanan masyarakat di tingkat regional. Semua ini memerlukan adanya kebijakan pembangunan kewilayahan yang tepat.

Fenomena yang sering terjadi dalam pembangunan nasional di negara sedang berkembang adalah kuatnya paradigma sentralistik dalam pengambilan kebijakan ekonomi dan juga penguasaan aset-aset ekonomi. Hal ini akan menyebabkan timbulnya *backwash effect* (efek pencucian) di mana daerah yang lebih maju akan menguras sumberdaya yang tersedia di daerah kurang maju. Gunnar Myrdal (dalam Sukirno, 1985) menyebut fenomena ini sebagai kausasi kumulatif, yang akan memperbesar kesenjangan antara daerah kaya dan daerah miskin.

Untuk mencegah hal tersebut, pembangunan wilayah harus didasarkan atas perencanaan wilayah yang baik dan tidak dapat hanya mengandalkan mekanisme pasar. Mekanisme pasar semata tak akan dapat menyelesaikan masalah distribusi dan pemerataan kesempatan dan akses terhadap sumber-sumber ekonomi. Mekanisme pasar juga gagal untuk mengatur penanganan masalah eksternalitas yang disebabkan oleh kegiatan ekonomi. Hal inilah yang menuntut peran pemerintah daerah secara lebih signifikan dalam perencanaan dan pembangunan wilayah.

2.2.2 Perencanaan Pembangunan

Di hampir semua negara sedang berkembang, perencanaan pembangunan merupakan suatu hal yang baru dikenal luas setelah terjadinya Perang Dunia II. Seiring dengan maraknya perhatian pada pembangunan di negara sedang berkembang, pemerintah-pemerintah di negara-negara yang baru mendapat kemerdekaannya tersebut mulai belajar merencanakan pembangunan ekonomi di negaranya, untuk mencapai tujuan ekonomi yang diinginkan (Arsyad, 1999 : 19).

Walaupun istilah perencanaan pembangunan (ekonomi) telah dikenal luas dalam khazanah ilmu ekonomi, namun hampir semua buku teks tentang perencanaan

memberikan pengertian yang berbeda-beda tentang definisi dari perencanaan pembangunan. Para pakar ekonomipun belum ada kesepakatan tentang pengertian istilah perencanaan pembangunan ekonomi tersebut. Menurut Conyers dan Hills (dalam Arsyad, 1999:19), perencanaan adalah suatu proses yang bersinambung yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif penggunaan sumberdaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masa yang akan datang. Sicut dan Arndt (1991: 367) menyatakan bahwa :

perencanaan pembangunan mengacu pada berbagai upaya yang secara sadar dilakukan oleh pemerintah untuk mempengaruhi, mengarahkan, dan dalam beberapa hal, mengendalikan perubahan-perubahan konsumsi, penanaman modal, atau perdagangan internasional dalam kurun waktu tertentu.

Arthur W. Lewis (dalam Arsyad, 1999) menjabarkan perencanaan dalam 6 pengertian :

- (1) perencanaan berkaitan dengan letak geografis. Termasuk dalam pengertian ini perencanaan kota dan negara (*city and country planning*), perencanaan tata guna tanah, perencanaan fisik dan perencanaan wilayah;
- (2) perencanaan mempunyai arti keputusan penggunaan dana pemerintah di masa yang akan datang, jika pemerintah memiliki dana untuk dibelanjakan;
- (3) perencanaan berkaitan dengan perencanaan produksi yang hanya menggunakan sumberdaya manusia, bahan baku dan peralatan yang dialokasikan dengan jumlah tertentu, dan menjual produknya hanya pada perusahaan atau perorangan yang ditunjuk pemerintah;
- (4) perencanaan berarti setiap penentuan sasaran produksi oleh pemerintah, baik untuk perusahaan negara (BUMN) maupun swasta;
- (5) perencanaan berarti penetapan sasaran untuk perekonomian secara keseluruhan dengan maksud untuk mengalokasikan semua tenaga kerja, devisa, bahan mentah dan sumberdaya lainnya ke berbagai bidang perekonomian;

- (6) perencanaan kadangkala dipakai untuk menggambarkan sarana yang digunakan pemerintah untuk memaksakan sasaran yang ditetapkan sebelumnya kepada badan usaha swasta.

Harus diakui bahwa tidak terdapat kesepakatan di antara para ahli ekonomi tentang istilah perencanaan pembangunan, namun sebagian besar pakar menganggap bahwa perencanaan ekonomi mengandung arti pengendalian dan pengaturan suatu perekonomian dengan sengaja oleh pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu dalam jangka waktu tertentu pula (Arsyad, 1999:21).

2.2.3 Perencanaan Sektoral

Dalam ilmu ekonomi, terdapat asumsi keterbatasan sumberdaya yang dapat digunakan dalam kegiatan ekonomi. Asumsi ini mengharuskan setiap daerah untuk menetapkan dan memilih prioritas-prioritas kebijakan yang akan diimplementasikan. Prioritas-prioritas tersebut mencakup pula prioritas sektoral yang dipilih berdasarkan kemampuan sektor ekonomi untuk menjadi lokomotif yang menggerakkan perekonomian. Hal inilah yang menegaskan perlunya perencanaan sektoral dalam perekonomian.

Dasar teori perencanaan sektoral adalah strategi pembangunan tidak seimbang (*unbalanced development*) yang dikemukakan oleh Albert O. Hirschman dan Paul Streteen. Menurut mereka, pembangunan tidak seimbang lebih cocok untuk diterapkan pada negara sedang berkembang, dikarenakan beberapa hal (dalam Sukirno, 1985:322) :

- (1) secara historis, pola pembangunan ekonomi coraknya tidak seimbang;
- (2) untuk mempertinggi efisiensi penggunaan sumberdaya-sumberdaya yang tersedia, harus ada prioritas dalam alokasinya;
- (3) pembangunan tak seimbang akan menimbulkan kemacetan (*bootleneck*) dalam proses pembangunan, tetapi akan menjadi pendorong dalam pembangunan selanjutnya.

Hirschman berpendapat bahwa perekonomian berada dalam sebuah struktur interdependensi (saling ketergantungan). Hal ini berarti pembangunan satu sektor ekonomi akan mempengaruhi sektor ekonomi yang lain melalui apa yang disebut Hirschman sebagai keterkaitan ke depan (*forward linkage*) dan keterkaitan ke belakang (*backward linkage*). Tugas pemerintah dalam perencanaan sektoral adalah untuk memilih sektor pemimpin (*leading sector*) yang akan dijadikan prioritas dalam alokasi sumberdaya ekonomi. Pembangunan sektor pemimpin ini akan terdapat mekanisme pendorong pembangunan (*induced mechanism*) yang tercipta sebagai akibat adanya hubungan antar berbagai sektor dalam penyediaan barang mentah dan barang antara. Adanya hubungan dan saling keterkaitan antar sektor inilah yang nantinya akan menggerakkan roda perekonomian dalam suatu wilayah secara keseluruhan (Djojohadikusumo, 1991).

Untuk mencapai tujuan tersebut, pemilihan sektor unggulan harus memiliki dasar yang kuat, serta didasarkan atas penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks perencanaan pembangunan, masalah yang sering dihadapi adalah dalam menentukan sektor pemimpin (*leading sector*) yang memiliki derajat keterkaitan yang besar dan mencakup banyak mata rantai kegiatan ekonomi.

2.2.4 Sektor Pemimpin

Sektor Pemimpin (*leading sector*) berdasarkan uraian di atas adalah sektor yang mendapat prioritas pengembangan melalui prioritas alokasi sumberdaya ekonomi yang dimiliki. Pemilihan sektor pemimpin didasarkan atas kuatnya keterkaitan sektor tersebut dengan sektor-sektor lain dalam sebuah perekonomian. Dalam konteks perencanaan, sektor pemimpin ini memiliki banyak nama namun dengan karakteristik yang sama. Beberapa nama yang digunakan untuk menunjuk sektor pemimpin antara lain sektor unggulan (Yuwono, 1999), sektor kunci (Arief, 1993) dan kompetensi inti (Husseini, 2000).

Menurut Arief (1993 : 219), metode yang dapat digunakan untuk menentukan sektor kunci antara lain :

- (1) sektor kunci adalah sektor yang memiliki derajat keterkaitan yang paling kuat, baik keterkaitan ke depan (*forward linkage*) maupun keterkaitan ke belakang (*backward linkage*);
- (2) sektor kunci adalah sektor yang menghasilkan output bruto relatif tinggi sehingga dapat mempertahankan final demand yang relatif tinggi pula;
- (3) sektor kunci adalah sektor yang memiliki penerimaan devisa yang relatif paling tinggi;
- (4) sektor kunci adalah sektor yang memiliki daya serap tenaga kerja yang relatif paling tinggi.

Perroux (dalam Usman, 1988) menjelaskan ciri-ciri yang dimiliki oleh industri pemimpin (*leading industries*) yaitu :

- (1) relatif baru dan dinamis, serta mempunyai tingkat teknologi yang tinggi.
- (2) permintaan terhadap produknya mempunyai elastisitas pendapatan yang tinggi.
- (3) mempunyai kaitan antar industri, kaitan ke depan (*forward linkage*) dan kaitan ke belakang (*backward linkage*).

Menurut Kuncoro (1997), keunggulan sebuah sektor atau subsektor dapat dilihat dengan menganalisis struktur perilaku dan kinerjanya. Dari segi struktur, sebuah sektor dapat dinilai dari :

- (1) besar kecil keterkaitan ke belakang yang dimiliki;
- (2) besar kecil keterkaitan ke depan yang dimiliki;
- (3) derajat konsentrasi industri di sektor tersebut.

Perilaku sebuah sektor dapat dianalisis dari :

- (1) besar kecil pengganda output yang ditimbulkan;
- (2) besar kecil pengganda pendapatan yang ditimbulkan;
- (3) besar kecil pengganda tenaga kerja yang ditimbulkan.

Adapun indikator yang dipakai untuk menilai kinerja sebuah sektor adalah :

- (1) derajat ketergantungan ekspor sektor tersebut;
- (2) dampak pengganda yang ditimbulkan ekspor terhadap output;
- (3) dampak pengganda yang ditimbulkan ekspor terhadap tenaga kerja.

2.2.5 Analisis Input-Output (*Input-Output Analysis*)

Analisis Input-Output (Analisis I-O) merupakan teknik baru yang dikenalkan oleh Wassily W. Leontief pada tahun 1951. Analisis ini digunakan untuk menelaah keterkaitan antar industri dalam upaya untuk memahami kompleksitas perekonomian serta upaya untuk mempertahankan keseimbangan antara penawaran dan permintaan (Arsyad, 1999:213).

Analisis Input-Output sangat bermanfaat dalam perencanaan pembangunan, termasuk dalam perencanaan regional. Dalam perencanaan wilayah, penyusunan tabel Input-Output regional sangat dianjurkan untuk membuat perencanaan dengan basis pemahaman yang komprehensif terhadap potensi ekonomi wilayah dan prospek pengembangannya (Aziz, 1994:149).

Menurut Muchdie (2000), sebagai model kuantitatif, model Input-Output mampu memberi gambaran yang menyeluruh tentang :

- (1) struktur perekonomian yang mencakup struktur output dan nilai tambah masing-masing kegiatan ekonomi di suatu daerah;
- (2) struktur input antara (*intermediate input*), yaitu penggunaan barang dan jasa oleh kegiatan produksi di suatu daerah;
- (3) struktur penyediaan barang dan jasa baik yang berupa produksi dalam negeri maupun yang berasal dari impor;
- (4) struktur permintaan barang dan jasa, baik permintaan untuk produksi maupun permintaan akhir untuk konsumsi, investasi dan ekspor;

Asumsi-asumsi yang berlaku dalam model Input-Output adalah (Gaspersz, 1990:217) :

- (1) asumsi homogenitas, yaitu bahwa suatu sektor memproduksi suatu output tunggal dengan struktur input tunggal, dan tidak ada substitusi otomatis antara berbagai sektor;
- (2) asumsi proporsionalitas, yaitu bahwa dalam proses produksi hubungan antara input dan output bersifat linear;
- (3) asumsi aditivitas, yaitu bahwa efek total dari pelaksanaan produksi di berbagai sektor dihasilkan oleh masing-masing sektor secara terpisah.

Dengan adanya asumsi-asumsi tersebut, maka berarti model Input-Output bersifat terbuka dan statis. Sifat terbuka dan statis ini merupakan salah satu kelemahan model input-output. Walaupun demikian, analisis Input-Output tetap saja merupakan analisis yang sangat berharga, terutama untuk memahami keterkaitan antar sektor atau antar industri.

Metode yang digunakan dalam penyusunan model Input Output ada dua, yaitu dengan metode survey dan non-survey. Metode survey, walaupun diakui memiliki ketelitian paling tinggi, namun membutuhkan waktu dan biaya yang sangat besar. Menurut Richardson (dalam Muchdie, 2000) sebuah tabel yang disusun dengan metode survey memerlukan dana sepuluh kali lebih besar dan waktu sepuluh kali lebih lama dibanding metode non-survey. Akibatnya, hasil tabel tersebut sudah kadaluwarsa ketika dipublikasikan.

Salah satu metode non-survey adalah metode RAS, yang dikembangkan oleh Cambridge Growth Project pada tahun 1960. Metode RAS merupakan satu metode yang memproyeksikan suatu tabel I-O yang baru dengan menggunakan koefisien tabel i-O yang lama sebagai tabel dasar. Teknik ini didasarkan pada matriks r , A , s , untuk menghasilkan tabel I-O yang baru.

Matriks koefisien tabel I-O, yaitu $A = (a_{ij})$ terbentuk oleh dua pengaruh, yaitu pengaruh substitusi dan pengaruh fabrikasi (pembuatan). Apabila pengganda substitusi diberi notasi r dan pengganda fabrikasi diberi notasi s , sedang A_0 adalah

matriks koefisien input nasional dan A_t adalah matriks regional, maka secara matematis dapat dirumuskan :

$$A_t = r A_0 s$$

Proses penyusunan matriks dengan menggunakan pengganda baris ke-r dan pengganda baris ke-s berlanjut terus sampai diperoleh suatu matriks dimana jumlah angka untuk masing-masing baris sama dengan jumlah permintaan antara masing-masing sektor dan jumlah angka masing-masing kolom sama dengan jumlah input antara masing-masing sektor. Dengan demikian akan terbentuk tabel I-O regional yang diproyeksikan dari tabel I-O nasional sebagai tabel dasar.

Dalam penyusunan matriks dengan menggunakan metode RAS ini, koefisien teknis tabel Input Output turunan diasumsikan sama dengan koefisien teknis tabel dasar. Hal ini berarti perbandingan antara input dan output sektor-sektor ekonomi dalam tabel turunan diasumsikan sama dengan tabel dasar.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, bertujuan untuk memaparkan prospek sektor-sektor ekonomi yang ada di Kabupaten Sumenep dalam kerangka penentuan prioritas sektoral dalam perencanaan pembangunan regional di Kabupaten Sumenep. Penelitian ini bersifat *ex post facto*, yaitu bahwa data dikumpulkan setelah semua kejadian berlangsung untuk meneliti hubungan sebab akibat dan keterkaitan dari data yang tersedia.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data yang akan digunakan adalah data sekunder yang telah dikumpulkan oleh pihak-pihak yang berwenang dalam pengumpulan data dan perencanaan pembangunan. Data sekunder yang diperlukan diperoleh dari instansi-instansi seperti Badan Pusat Statistik (BPS) Propinsi Jawa Timur, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumenep, Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumenep, dan instansi terkait lainnya.

Sedangkan spesifikasi data yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebanyak 13 sektor, yaitu meliputi; (1) pertanian, (2) pertambangan dan penggalian, (3) industri pengolahan, (4) listrik, gas dan air bersih, (5) bangunan, (6) perdagangan, hotel dan restoran, (7) angkutan dan komunikasi, (8) keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, dan (9) jasa-jasa.

3.3 Metode Analisis Data

Untuk memecahkan permasalahan yang telah dirumuskan pada 1.2, penelitian ini menggunakan metode analisis data untuk mengolah data yang telah dikumpulkan. Adapun metode analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah :

3.3.1 Analisis Input Output

Dalam penelitian ini, analisis yang akan digunakan adalah analisis input output yang diperoleh dari pengolahan tabel input-ouput yang tersedia. Bentuk umum tabel input-output dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Bentuk Umum Tabel Input-Output

Alokasi Output Susunan Input			Permintaan Antara					Permintaan Akhir					Jumlah Output
			Sektor Produksi					RT	KP	I	S	E	
			i	...	j	...	N						
I A	S P	l	x_{11}	..	x_{1j}	..	x_{1n}	RT_1	KP_1	I_1	S_1	E_1	X_1
N N	E R
P T	K O
U A	T D	i	x_{i1}	..	x_{ij}	..	x_{in}	RT_i	KP_i	I_i	S_i	E_i	X_i
T R	O U
A R	K
	S	n	x_{n1}	..	x_{nj}	..	x_{nn}	RT_n	KP_n	I_n	S_n	E_n	X_n
Upah dan Gaji RT			L_i	..	L_j	..	L_n						
Nilai Tambah Lain			V_i	..	V_j	..	V_n						
Impor			M_i	..	M_j	..	M_n						
Jumlah Input			X_i	..	X_j	..	X_n						

x_{ij} = banyaknya output sektor i yang digunakan sebagai input sektor ke-j

Y_i = permintaan akhir sektor i

$$= RT_i + KP_i + I_i + S_i + E_i$$

di mana;

RT_i = konsumsi rumah tangga terhadap sektor ke-i

KP_i = konsumsi pemerintah terhadap sektor ke-i

I_i = pembentukan modal tetap (output sektor ke- i yang menjadi barang modal)

S_i = perubahan stok (output sektor ke- i yang menjadi perubahan stok)

E_i = ekspor barang dan jasa terhadap sektor ke- i

Bentuk umum tabel input-output pada tabel 1 dapat dijelaskan sebagai berikut : tabel baris menunjukkan bagaimana output suatu sektor dialokasikan, sebagian dialokasikan untuk permintaan antara (*intermediate demand*) dan sebagian untuk permintaan akhir (*final demand*). Permintaan akhir dalam tabel terdiri dari : (1) pengeluaran konsumsi rumah tangga; (2) pengeluaran konsumsi pemerintah; (3) pembentukan modal tetap; (4) perubahan stok, dan (5) ekspor. Tabel kolom menunjukkan penggunaan input antara maupun input primer yang disediakan oleh sektor lain untuk pelaksanaan produksi (Gaspersz, 1990:218).

Secara umum, dengan asumsi bahwa perekonomian hanya terdiri dari tiga sektor, dapat dinyatakan bahwa struktur input j terdiri dari input antara x_{ij} ($i = 1,2,3$) dan input primer V_j . Dengan demikian alokasi output sektor i dapat dinyatakan sebagai berikut :

$$X_i = \sum_{i=1}^3 x_{ij} + F_i$$

Struktur input sektor j dinyatakan sebagai :

$$X_j = \sum_{i=1}^3 x_{ij} + V_j$$

Koefisien input teknik dari tabel input output merupakan perbandingan antara output sektor ke- i yang dipergunakan sebagai input sektor ke- j (x_{ij}) dengan total output sektor yang bersangkutan (X_j), yang secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut (Gaspersz, 1990:219) :

$$a_{ij} = x_{ij} / X_j \quad \text{di mana } i,j = 1,2,3 \dots, n$$

a = koefisien input antara atau unit output sektor i yang dipakai sebagai input antara oleh sektor j untuk menghasilkan satu unit output sektor j

Dari koefisien teknis tersebut dapat dibentuk model input-output dalam notasi matriks, sebagai berikut (Gaspersz, 1990:219) :

$$AX + F = X \Leftrightarrow F = X - AX \Leftrightarrow Y = [I - A]X \dots \dots (1)$$

di mana :

A = matriks koefisien teknis

X = vektor kolom output total

F = vektor kolom permintaan akhir

$(I-A)^{-1}$ = invers matriks Leontief

Persamaan (1) dapat diubah menjadi :

$$X = [I - A]^{-1} Y \dots \dots \dots (2)$$

$[I-A]^{-1}$ merupakan matriks kebalikan Leontief atau disebut juga koefisien arah yang sangat berguna dalam analisis pembangunan wilayah. Koefisien tersebut juga menunjukkan keterkaitan antara tingkat permintaan akhir dengan output yang dihasilkan oleh suatu perekonomian.

3.3.2 Analisis Keterkaitan

Analisis keterkaitan digunakan untuk menghitung seberapa besar pengaruh sektor lain terhadap suatu sektor, baik sebagai penyedia input (keterkaitan ke belakang) maupun sebagai pengguna output (keterkaitan ke depan). Ada dua jenis keterkaitan, yaitu keterkaitan langsung dan keterkaitan langsung tidak langsung (Budiharsono, 1986:122). Keterkaitan langsung hanya menghitung pengaruh langsung dari adanya keterkaitan antar sektor, baik ke depan maupun ke belakang, sedangkan keterkaitan langsung tidak langsung menambahkan pengaruh tidak langsung dari keterkaitan antar sektor.

3.3.2.1 Keterkaitan ke Depan (*Forward Linkage*)

Untuk mengetahui keterkaitan langsung ke depan (*direct forward linkage*) dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut (Priyono, 2000:54) :

$$KLKD_i = \sum_{j=1}^n \frac{x_{ij}}{X_i} = \sum_{j=1}^n a_{ij} \quad i = 1, 2, 3, \dots, n$$

di mana :

$KLKD$ = keterkaitan langsung ke depan sektor ke-i

x_{ij} = banyaknya output sektor ke-i yang dipergunakan sebagai input sektor ke-j

X_i = total output sektor ke-i

a_{ij} = unsur matriks koefisien teknis baris ke-i kolom ke-j

Untuk mengetahui keterkaitan langsung dan tidak langsung ke depan dapat dihitung dengan rumus (Priyono, 2000:54) :

$$KLTLKD = \sum_{i=1}^n C_{ij} \quad I = 1,2,3,\dots,n$$

di mana :

$KLTLKD$ = Keterkaitan Langsung Tidak Langsung ke Depan

C_{ij} = unsur matriks kebalikan Leontief terbuka baris ke-i kolom ke-j

3.3.2.2 Keterkaitan ke Belakang (*Backward Linkage*)

Untuk mengetahui keterkaitan ke belakang (*backward linkage*) sebuah sektor dapat dihitung dengan formulasi sebagai berikut (Kuncoro, 1997:337) :

$$KLKK_j = \sum_{i=1}^n \frac{x_{ij}}{X_j} = \sum_{i=1}^n a_{ij} \quad j = 1,2,3, \dots, n$$

di mana :

$KLKK$ = keterkaitan langsung ke belakang

X_j = output domestik sektor ke-j

x_{ij} = banyaknya output sektor ke-i yang digunakan sebagai input sektor ke-j

a_{ij} = unsur matriks koefisien teknis baris ke-j kolom ke-i

Untuk mengetahui keterkaitan langsung dan tidak langsung ke belakang dapat dihitung dengan rumus (Priyono, 2000:54) :

$$KLTLKK = \sum_{j=1}^n C_{ij} \quad j = 1,2,3, \dots, n$$

di mana :

$KLTLKK$ = Keterkaitan Langsung Tidak Langsung ke Belakang

C_{ij} = unsur matriks kebalikan Leontief terbuka baris ke-j kolom ke-i

3.3.3 Analisis Pengganda (*Multiplier Analysis*)

Analisis pengganda diperlukan untuk mengetahui dampak investasi pada sebuah sektor terhadap perekonomian. Analisis pengganda dalam penelitian ini ditujukan untuk menghitung pengganda terhadap output, pendapatan dan terhadap tenaga kerja.

3.3.3.1 Pengganda Output (*Output Multiplier*)

Pengganda output digunakan untuk menjelaskan besarnya peningkatan output suatu sektor jika terjadi kenaikan satu satuan permintaan akhir pada sektor tersebut.

Formulasi matematis pengganda output sederhana, untuk mengetahui pengaruh perubahan permintaan akhir suatu sektor terhadap output sektor lain baik secara langsung maupun tak langsung dapat dirumuskan (Priyono, 2000:55) :

$$MXS_j = \sum_{i=1}^n C_{ij} \quad j = 1,2,3, \dots, n$$

di mana :

MXS_j = pengganda output sederhana sektor ke-j

C_{ij} = unsur matriks kebalikan Leontief terbuka baris ke-i kolom ke-j

Pengganda output total untuk mengetahui pengaruh perubahan akhir dalam suatu sektor terhadap output sektor lain, baik langsung, tak langsung maupun induksi, dirumuskan (Priyono, 2000:56) :

$$MXT_j = \sum_{i=1}^n D_{ij} \quad j = 1,2,3, \dots, n$$

di mana :

MXT_j = pengganda output total sektor ke-j

D_{ij} = unsur matriks kebalikan Leontief tertutup baris ke-i kolom ke-j

3.3.3.2 Pengganda Pendapatan (*Income Multiplier*)

Pengganda pendapatan sederhana merupakan penjumlahan pengaruh langsung dan tidak langsung, dirumuskan sebagai berikut (Priyono, 2000:56) :

$$MS_j = \sum_{i=1}^n a_{n+1,i} C_{ij} \quad j = 1,2,3, \dots, n$$

di mana :

MS_j = pengganda pendapatan sederhana sektor ke-j

C_{ij} = unsur matriks kebalikan Leontief baris ke-i kolom ke-j

$a_{n+1,i}$ = koefisien input gaji/upah RT baris ke n+1 kolom ke-i

Pengganda pendapatan total, merupakan penjumlahan antara pengaruh langsung dan tidak langsung, serta pengaruh induksi/imbasan (*induce*) dirumuskan (Priyono, 2000:57) :

$$MT_j = \sum_{i=1}^n a_{n+1,i} D_{ij} \quad j = 1,2,3, \dots, n$$

di mana :

MT_j = pengganda pendapatan total sektor ke-j

D_{ij} = unsur matriks kebalikan Leontief tertutup baris ke-i kolom ke-j

$a_{n+1,i}$ = koefisien input gaji/upah RT baris ke n+1 kolom ke-i

Pengganda pendapatan tipe I, merupakan besarnya pertambahan pendapatan pada suatu sektor akibat penambahan permintaan akhir sektor tersebut sebesar satu unit, dirumuskan (Priyono, 2000:57):

$$MI_j = \sum_{i=1}^n \frac{a_{n+1,i} C_{ij}}{a_{n+1,j}} \quad j = 1, 2, 3, \dots, n$$

di mana :

MI_j = pengganda pendapatan tipe I dari sektor ke-j

C_{ij} = unsur matriks kebalikan Leontief baris ke-i kolom ke-j

$a_{n+1,i}$ = koefisien input gaji/upah RT baris ke n+1 kolom ke-i

$a_{n+1,j}$ = koefisien input gaji/upah RT baris ke n+1 kolom ke-j

Pengganda pendapatan Tipe II untuk menghitung pengaruh langsung, tidak langsung dan pengaruh induksi (*induce*), dirumuskan (Priyono, 2000:58) :

$$MII_j = \sum_{i=1}^n \frac{a_{n+1,i} D_{ij}}{a_{n+1,j}} \quad j = 1, 2, 3, \dots, n$$

MIJ_j = pengganda pendapatan tipe II dari sektor ke-j

D_{ij} = unsur matriks kebalikan Leontief tertutup baris ke-i kolom ke-j

$a_{n+1,i}$ = koefisien input gaji/upah RT baris ke n+1 kolom ke-i

$a_{n+1,j}$ = koefisien input gaji/upah RT baris ke n+1 kolom ke-j

3.3.4 Koefisien Penyebaran dan Kepekaan Penyebaran

Koefisien penyebaran (*coefficient of dispersion*) menunjukkan besarnya pengaruh total yang ditimbulkan oleh satu unit permintaan akhir sektor ke-j terhadap semua sektor dalam suatu perekonomian. Koefisien penyebaran merupakan keterkaitan langsung dan tidak langsung ke belakang yang dinormalkan dalam jumlah sektor dan jumlah seluruh koefisien matriks kebalikan Leontief (Sutomo, dalam Priyono, 2000), yang dirumuskan :

$$\alpha_j = \frac{\sum_{i=1}^n C_{ij}}{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n C_{ij}} \quad j = 1, 2, 3, \dots, n$$

di mana :

α_j = Koefisien penyebaran sektor ke-j

C_{ij} = unsur matriks kebalikan Leontief terbuka baris ke-i kolom ke-j

Kepekaan Penyebaran (*sensitivity of dispersion*) menunjukkan pengaruh perubahan satu unit permintaan akhir terhadap semua sektor dalam suatu perekonomian. Kepekaan Penyebaran ini merupakan keterkaitan langsung dan tidak langsung ke depan yang dinormalkan dalam jumlah sektor dan jumlah seluruh koefisien matriks kebalikan Leontief (Sutomo, dalam Priyono, 2000), dengan rumus :

$$\beta_i = \frac{n \sum_{j=1}^n C_{ij}}{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n C_{ij}} \quad i=1,2,3, \dots, n$$

di mana :

β_i = Koefisien penyebaran sektor ke-j

C_{ij} = unsur matriks kebalikan Leontief terbuka baris ke-i kolom ke-j

Apabila nilai indeks α_i dari sektor $i > 1$, maka berarti sektor tersebut memperoleh pengaruh cukup besar dari sektor lainnya, atau dengan kata lain sektor tersebut peka terhadap pengaruh sektor lain. Sebaliknya bila β_i dari sektor $j > 1$, maka berarti pengaruh sektor tersebut terhadap sektor lain cukup besar.

3.3.5 Analisis Kebocoran Wilayah

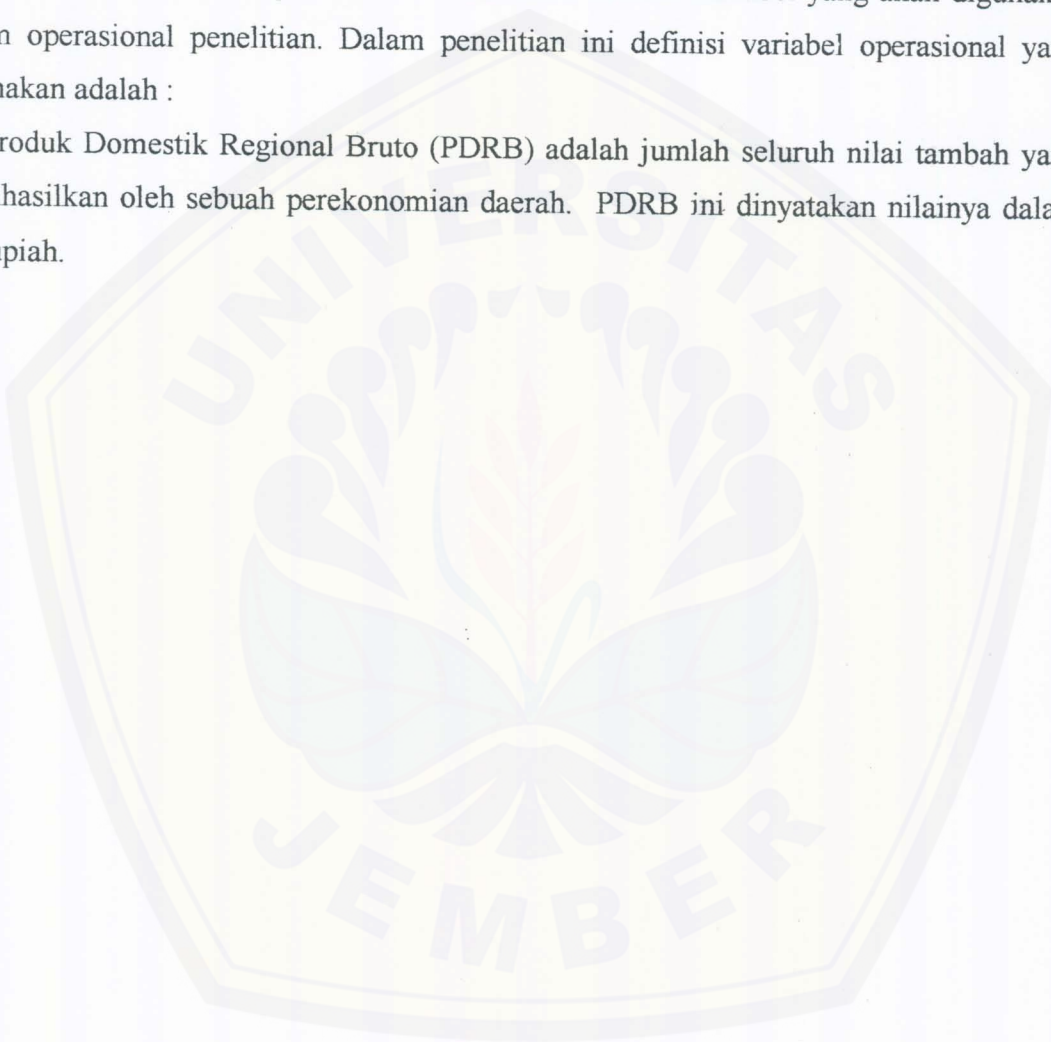
Analisis ini bertujuan untuk mengetahui besar aliran sumber daya yang keluar dari daerah karena adanya impor bahan baku. Penghitungan kebocoran wilayah dilakukan dengan membandingkan muatan impor (*import content*) dalam bahan baku yang dipakai oleh seluruh sektor dalam suatu perekonomian dengan keseluruhan bahan baku yang dipakai. Bila hasil perbandingan ini menunjukkan angka yang relatif besar, berarti tingkat kebocoran wilayah yang terjadi juga relatif besar. Secara matematis, dapat dirumuskan :

$$\text{Kebocoran wilayah} = \frac{\text{bahan baku impor}}{\text{seluruh bahan baku}} \times 100\%$$

3.4 Definisi Variabel Operasional dan Pengukurannya

Definisi variabel operasional adalah suatu definisi variabel yang akan digunakan dalam operasional penelitian. Dalam penelitian ini definisi variabel operasional yang digunakan adalah :

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah seluruh nilai tambah yang dihasilkan oleh sebuah perekonomian daerah. PDRB ini dinyatakan nilainya dalam rupiah.





BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Daerah Penelitian

4.1.1 Keadaan Umum Kabupaten Sumenep

Kabupaten Sumenep berada di ujung timur Pulau Madura, terletak di antara $113^{\circ}32'54''$ – $116^{\circ}16'48''$ BT dan $4^{\circ}55'$ – $7^{\circ}24'$ LS. Wilayah sebelah utara Kabupaten Sumenep berbatasan dengan Laut Jawa, di sebelah timur berbatasan dengan Laut Jawa dan Laut Flores, di sebelah selatan dengan Selat Madura dan di sebelah barat dengan Kabupaten Pamekasan.

Luas wilayah Kabupaten Sumenep adalah $1.998,54 \text{ km}^2$ yang secara geografis terbagi menjadi dua bagian :

1. bagian daratan dengan luas $1.147,24 \text{ km}^2$ atau 57,40 % dari keseluruhan wilayah;
2. bagian kepulauan dengan luas $851,30 \text{ km}^2$ atau 42,60 % dari keseluruhan wilayah, meliputi 74 pulau baik yang berpenghuni maupun yang tidak berpenghuni.

Secara administratif, wilayah Kabupaten Sumenep terbagi atas 25 wilayah kecamatan, 4 perwakilan kecamatan, 328 desa dan 4 kelurahan.

4.1.2 Keadaan Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Sumenep pada tahun 2000 adalah sebanyak 980.186 jiwa dengan pertumbuhan sebesar 0,20 % per tahun dan kepadatan penduduk sekitar 490 jiwa per km^2 . Dari jumlah tersebut, jumlah penduduk perempuan lebih besar dibandingkan penduduk laki-laki, yakni 499.657 penduduk perempuan dan 456.491 penduduk laki-laki.

Berdasarkan usianya, penduduk usia kerja (15 sampai dengan 55 tahun) mencapai jumlah 709.244 jiwa, yang merupakan sumber daya manusia yang cukup potensial bila dilihat dari sisi kuantitas. Dari sisi kualitas, berdasarkan tingkat pendidikan yang pernah ditempuh, penduduk yang tidak tamat SD menunjukkan proporsi yang paling tinggi, yaitu sebesar 538.513 jiwa. Keadaan sumber daya

manusia yang timpang seperti ini tentu saja akan berpengaruh besar terhadap pembangunan daerah di wilayah Kabupaten Sumenep.

Gambaran tentang penduduk berdasarkan usia dan tingkat pendidikan disajikan pada tabel 4.1

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Sumenep berdasarkan Usia dan Tingkat Pendidikan (2000)

No.	Uraian Penduduk	Jumlah		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
A.	Berdasarkan Usia			
	1. Kurang 15 th.	117.356	105.932	223.228
	2. 15 th. s/d 55 th.	355.928	373.316	709.244
	3. Di atas 55 th.	17.078	30.576	47.654
	Jumlah	470.362	509.824	980.186
B.	Berdasarkan Pendidikan			
	1. Tidak Tamat SD	258.487	280.026	538.513
	2. Tamat SD	81.100	90.027	173.127
	3. Tamat SLTP	15.931	17.258	33.189
	4. Tamat SLTA	13.401	14.516	27.916
	5. Tamat D3/Akademi	1.041	1.127	2.168
	6. Tamat S1/S2	1.640	1.776	3.416
	Jumlah	371.600	407.730	776.336

Sumber : Sumenep dalam Angka (2000)

Berdasarkan mata pencahariannya, penduduk Kabupaten Sumenep sebagian besar bekerja di sektor pertanian yaitu sebesar 348.066 jiwa atau 70,13 % dari keseluruhan tenaga kerja yang ada. Ini berarti bahwa sektor pertanian merupakan sektor utama dalam perekonomian wilayah Kabupaten Sumenep bila ditinjau dari

daya serap terhadap tenaga kerja. Gambaran tentang mata pencaharian penduduk Kabupaten Sumenep dapat dilihat pada tabel 4.2.

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Kabupaten Sumenep yang Bekerja berdasarkan Lapangan Usaha Utama (2000)

No.	Sektor	Tenaga Kerja (jiwa)	Persentase
1	Pertanian	293.517	43,9
2	Pertambangan dan Penggalian	1.909	0,28
3	Industri Pengolahan	100.645	15,1
4	Listrik, Gas dan Air Minum	1.709	0,23
5	Konstruksi	32.451	4,85
6	Perdagangan, hotel dan restoran	117.984	17,6
7	Angkutan dan Komunikasi	27.152	4,06
8	Keuangan, Persewaan dan J. Perusahaan	5.268	0,79
9	J a s a	87.920	13,15
	J u m l a h	668.555	100

Sumber : Susenas Propinsi Jawa Timur (2000)

4.1.3 Produk Domestik Regional Bruto

Salah satu tolok ukur utama keberhasilan perekonomian daerah adalah angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah tersebut. PDRB menggambarkan nilai tambah yang dihasilkan oleh sebuah perekonomian daerah, dan sekaligus menjelaskan besaran aktivitas ekonomi daerah. Dengan melihat nilai PDRB, dapat dinilai pertumbuhan dan perkembangan ekonomi suatu daerah.

PDRB Kabupaten Sumenep antara tahun 1998 hingga tahun 2000 menunjukkan pertumbuhan yang positif. Hal ini berarti terdapat peningkatan aktivitas perekonomian yang tergambar dalam peningkatan nilai tambah yang dihasilkan oleh

sektor-sektor ekonomi di Kabupaten Sumenep. Struktur PDRB Kabupaten Sumenep dapat digunakan untuk melihat kinerja masing-masing sektor dalam memberikan kontribusi terhadap nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh perekonomian wilayah.

Tabel 4.3 PDRB Kabupaten Sumenep atas Dasar Harga Konstan 1993
(dalam juta rupiah)

No	Sektor	1997	1998	1999
1.	Pertanian	387.692,04 (43%)	374.162,31 (41%)	380.907,41 (41%)
2.	Pertambangan dan Galian	113.137,49 (12,38%)	119.882,26 (13,1%)	121.887,45 (13%)
3.	Industri Pengolahan	40.009,84 (4,09%)	42.010,5 (4,6%)	453.052,73 (4,7%)
4.	Listrik, Gas dan Air Bersih	2.704,76 (0,28%)	2.939,08 (0,3%)	3.081,65 (0,3%)
5.	Bangunan	60.029,06 (6,14%)	34.050,74 (3,7%)	35.606,86 (3,8%)
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	71.267,64 (7,27%)	71.162,18 (7,7%)	73.604,67 (7,8%)
7.	Angkutan dan Komunikasi	67.628,29 (6,91%)	73.519,77 (8,1%)	77.089,62 (8,2%)
8.	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	58.971,69 (6,03%)	57.008 (6,3%)	59.189,40 (6,3%)
9.	Jasa	136.185,58 (13,92%)	137.774,39 (15,1%)	142.276,14 (15,1%)
	PDRB	937.626,49 (100%)	912.509,23 (100%)	938.695,93 (100%)

Sumber : BPS Kabupaten Sumenep (2000)

Dari tabel 4.3, terlihat bahwa peranan sektor pertanian dalam PDRB Kabupaten Sumenep merupakan yang paling besar yaitu sebesar 41 % yang terus bertahan sejak tahun 1998 hingga tahun 2000. Struktur PDRB ini menunjukkan perekonomian Kabupaten Sumenep yang bersifat agraris bila ditinjau dari kontribusi sektoral. Fenomena ini harus dilihat lebih lanjut dalam kerangka pengembangan perekonomian wilayah. Selain dari sisi kontribusi sektoral, pengembangan perekonomian wilayah juga harus memperhitungkan kemampuan sebuah sektor untuk menjadi sektor pemimpin (*leading sector*) bila ditinjau dari pengaruhnya terhadap pengembangan sektor-sektor lain dalam perekonomian, baik dilihat dari sisi keterkaitan maupun dari sisi dampak pengganda.

Selain sektor pertanian, sektor lain yang dominan dalam perekonomian Kabupaten Sumenep adalah sektor jasa yang kontribusinya terhadap PDRB untuk tahun 1998 hingga tahun 2000 sekitar 15%, dan sektor pertambangan dan penggalian yang memiliki kontribusi sekitar 13%. Ketiga sektor inilah yang dominan dalam kontribusi sektoral pada PDRB Kabupaten Sumenep antara tahun 1998 hingga tahun 2000, namun hal ini tidak otomatis menunjukkan bahwa ketiga sektor inilah yang patut dijadikan prioritas sektoral dalam kerangka pengembangan wilayah Kabupaten Sumenep.

Pada wilayah yang lebih luas, perekonomian Propinsi Jawa Timur didominasi oleh kontribusi sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor pertanian. Seperti pada tabel 4.4, ketiga sektor tersebut merupakan sektor-sektor yang memberikan kontribusi sektoral terbesar terhadap perekonomian Jawa Timur pada kurun waktu 1997 hingga 1999. Walaupun terjadi perubahan dalam kontribusi sektoral dalam tiga tahun tersebut, namun sektor-sektor tersebut tetap dominan dalam struktur PDRB Propinsi Jawa Timur.

Tabel 4.4 PDRB Propinsi Jawa Timur atas Dasar Harga Konstan 1993
(dalam juta rupiah)

No	Sektor	1997	1998	1999
1.	Pertanian	10.360.810,63 (15,97%)	9.840.471,06 (18,09%)	10.004.104,05 (18,17%)
2.	Pertambangan dan Galian	875.522,36 (1,35%)	501.798,67 (0,92%)	483.149,93 (0,88%)
3.	Industri Pengolahan	19.409.565,66 (29,93%)	15.104.078,2 (27,77%)	15.064.191,66 (27,37%)
4.	Listrik, Gas dan Air Bersih	1.143.104,3 (1,76%)	1.179.194,65 (2,17%)	1.332.448,19 (2,42%)
5.	Bangunan	4.370.532,83 (6,74%)	2.918.521,24 (5,37%)	2.667.858,49 (4,85%)
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	13.828.696,97 (21,32%)	11.369.207,08 (20,90%)	11.722.811,23 (21,30%)
7.	Angkutan dan Komunikasi	4.236.276,08 (6,53%)	4.051.086,25 (7,45%)	4.443.028,71 (8,07%)
8.	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	4.145.932,45 (6,39%)	3.296.433,66 (6,06%)	3.107.423,21 (5,65%)
9.	Jasa	6.483.125,59 (10,00%)	6.138.105,59 (11,28%)	6.213.111,11 (11,29%)
	PDRB	64.853.575,80 (100%)	54.398.896,74 (100%)	55.038.126,58 (100%)

Sumber : BPS Propinsi Jawa Timur (2000)

Bila dilihat dari laju pertumbuhan sektoral, terlihat bahwa untuk tahun 1998 semua sektor perekonomian di Jawa Timur mengalami pertumbuhan negatif, sementara di Sumenep sektor perekonomian pada umumnya masih mencatat pertumbuhan positif, kecuali sektor pertanian, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dan sektor bangunan yang mengalami pertumbuhan negatif paling besar.

Pada tahun 1998, kedua wilayah mengalami pertumbuhan negatif pada angka PDRB, masing-masing sebesar $-1,6\%$ untuk Jawa Timur dan $-0,3\%$ untuk Kabupaten Sumenep. Hal ini diperkirakan disebabkan oleh dampak krisis ekonomi yang melanda perekonomian nasional.

Pada Tahun 1999, PDRB kedua wilayah sudah mulai tumbuh, di mana Propinsi Jawa Timur mencatat pertumbuhan sebesar $0,1\%$ dan Kabupaten Sumenep sebesar $0,3\%$. Secara sektoral, sektor-sektor perekonomian di Jawa Timur telah mulai tumbuh, kecuali sektor pertambangan dan penggalian, sektor bangunan dan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan yang masih mencatat angka pertumbuhan negatif. Sementara untuk Kabupaten Sumenep, pada tahun 1999 semua sektor telah mengalami pertumbuhan positif, dengan sektor industri pengolahan yang mencatat laju pertumbuhan tertinggi sebesar $9,78\%$. Sektor-sektor lain rata-rata masih tumbuh di bawah 1% .

Tabel 4.5 Laju Pertumbuhan PDRB Propinsi Jawa Timur dan Kabupaten Sumenep 1998 –1999 (dalam persen)

No	Sektor	Jawa Timur		Sumenep	
		1998	1999	1998	1999
1	Pertanian	$-0,5\%$	$0,2\%$	$-0,3\%$	$0,2\%$
2	Pertambangan dan Galian	$-4,3\%$	$-0,4\%$	$0,6\%$	$0,2\%$
3	Industri Pengolahan	$-2,2\%$	0%	$0,5\%$	$9,78\%$
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	$0,3\%$	$1,3\%$	$0,9\%$	$0,5\%$
5	Bangunan	$-3,3\%$	$-0,9\%$	$-4,3\%$	$0,5\%$
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	$-1,8\%$	$0,3\%$	0%	$0,3\%$
7	Angkutan dan Komunikasi	$-0,4\%$	1%	$0,9\%$	$0,5\%$
8	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	-2%	$-0,6\%$	$-0,3\%$	$0,4\%$
9	Jasa	$-0,5\%$	$0,1\%$	$0,1\%$	$0,3\%$
	PDRB	$-1,6\%$	$0,1\%$	$-0,3\%$	$0,3\%$

Sumber : Tabel 4.3 dan 4.4 (diolah)

Dari sisi PDRB per kapita pembangunan tahun, sebagaimana terlihat pada tabel 4.6, Propinsi Jawa Timur mencatat angka 1.900.929. Angka ini menurun drastis pada tahun 1998, menjadi 1.584.580 dan relatif stabil untuk tahun 1999. Sedangkan untuk Kabupaten Sumenep penurunan angka PDRB per kapita per tahun tidak begi drastis, dengan angka terendah pada tahun 1999 sebesar 997.863,14. Hal ini juga dimungkinkan karena struktur perekonomian Jawa Timur yang lebih memiliki orientasi ekspor impor dibandingkan Kabupaten Sumenep, sehingga dampak krisis nilai tukar rupiah terhadap Jawa Timur cenderung untuk lebih besar dibandingkan terhadap Kabupaten Sumenep.

Tabel 4.6 PDRB Per Kapita per tahun Propinsi Jawa Timur dan Kabupaten Sumenep (dalam rupiah)

No	Daerah	1997	1998	1999
1	Jawa Timur	1.900.929	1.584.580	1.583.226
2	Sumenep	1.034.292,97	1.031.813,78	997.863,14

Sumber : Biro Pusat Statistik (2000)

4.2 Analisis Data dan Pembahasan

4.2.1 Analisis Keterkaitan Antar Sektor

Analisis keterkaitan ini ditujukan untuk mengetahui tingkat keterkaitan suatu sektor terhadap sektor-sektor lain dalam perekonomian, baik sebagai penyedia input bagi sektor-sektor lain (keterkaitan ke depan) maupun sebagai pemakai output dari sektor-sektor lain (keterkaitan ke belakang). Dengan mengetahui tingkat keterkaitan antar sektor, dapat ditentukan prioritas investasi dalam sebuah perekonomian wilayah. Investasi sebaiknya diarahkan pada sektor-sektor yang memiliki koefisien keterkaitan yang tinggi, sehingga dapat mendorong kemajuan sektor-sektor lain.

Tabel 4.7. Koefisien Keterkaitan Langsung dan Tidak Langsung Sektor-sektor Perekonomian Kabupaten Sumenep

Sektor	KLKD	Rank	KLKK	Rank	KLTLKD	Rank	KLTLKB	Rank
1	0.09720	6	0.04020	9	0.65371	2	0.59671	3
2	0.06571	8	0.00897	7	0.19016	6	0.13342	7
3	0.04108	9	0.00876	8	0.04311	9	0.01079	9
4	0.15256	4	0.10581	6	0.15406	7	0.10731	8
5	0.07188	7	0.17148	5	0.07220	8	0.17180	6
6	0.16101	3	0.21253	4	0.27409	4	0.32561	5
7	0.33340	2	0.36285	3	0.76240	1	0.79185	1
8	0.53032	1	0.43219	2	0.55668	3	0.45855	4
9	0.12056	5	0.59183	1	0.25341	5	0.72468	2

Sumber : data diolah (2002)

Keterangan :

KLKD = Keterkaitan Langsung ke Depan

KLKK = Keterkaitan Langsung ke Belakang

KLTLKD = Keterkaitan Langsung Tidak Langsung ke Depan

KLTLKB = Keterkaitan Langsung Tidak Langsung ke Belakang

Pada tabel 4.7 diperlihatkan bahwa dari sisi keterkaitan langsung ke depan, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan merupakan sektor yang paling tinggi nilai koefisiennya. Hal ini menunjukkan bahwa sektor ini merupakan pendukung bagi sektor-sektor lain dalam perekonomian wilayah di Kabupaten Sumenep, disusul sektor angkutan dan komunikasi (0.3340), sektor perdagangan, hotel dan restoran (0.16101) dan sektor listrik, gas dan air bersih (0.15256).

Berdasarkan keterkaitan langsung ke belakang, sektor yang memiliki nilai koefisien tertinggi adalah sektor jasa (0.59183). hal ini berarti bahwa sektor tersebut memberikan sumbangan kepada sektor yang lain dalam jumlah yang cukup besar. Sektor-sektor lain yang menonjol adalah : sektor angkutan dan komunikasi (0.43219), sektor angkutan dan komunikasi (0.36285) dan sektor perdagangan, hotel dan restoran (0.21253).

Sektor pertanian yang merupakan sektor dengan kontribusi sektoral terbesar dalam PDRB ternyata memiliki angka keterkaitan langsung yang lemah, baik ke

depan maupun ke belakang. Walaupun demikian, sektor pertanian ternyata memiliki koefisien keterkaitan langsung dan tidak langsung yang cukup besar, yaitu menduduki peringkat ke dua untuk keterkaitan langsung dan tidak langsung ke depan (0.65371) dan peringkat ke tiga untuk keterkaitan langsung dan tidak langsung ke belakang (0.59671). Berdasarkan koefisien keterkaitan langsung dan tidak langsung ke depan, sektor lain yang menonjol adalah : sektor angkutan dan komunikasi menduduki peringkat pertama (0.76240) dan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan yang menduduki peringkat ketiga (0.55668). Ini menunjukkan bahwa kedua sektor tersebut ditambah sektor pertanian merupakan sektor penyedia input bagi sektor-sektor lain dalam perekonomian Kabupaten Sumenep.

Berdasarkan koefisien keterkaitan langsung dan tidak langsung ke belakang, sektor yang menduduki peringkat pertama dan kedua adalah sektor angkutan dan komunikasi (0.79185) dan sektor jasa (0.72468) sedangkan peringkat ketiga ditempati oleh sektor pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga sektor ini memberikan sumbangan yang cukup besar bagi perkembangan sektor-sektor lain, terutama di sektor hulu.

Analisis keterkaitan menunjukkan bahwa sektor angkutan dan komunikasi dan sektor pertanian merupakan sektor yang patut dijadikan prioritas sektoral. Untuk sektor angkutan dan komunikasi, hal ini barangkali disebabkan oleh faktor geografis di mana Kabupaten Sumenep memiliki wilayah yang luas, sedangkan sektor pertanian merupakan sektor dengan kontribusi paling besar baik dalam penyerapan tenaga kerja maupun dalam struktur PDRB Kabupaten Sumenep. Walau demikian, secara umum tingkat keterkaitan antar sektor di Kabupaten Sumenep masih rendah, karena nilai koefisiennya masih di bawah satu. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan keterkaitan antar sektor dalam upaya pengembangan wilayah Kabupaten Sumenep, misalnya dengan memperkuat infrastruktur dan jalur transportasi dan komunikasi untuk mempercepat pergerakan perekonomian di Kabupaten Sumenep.

4.2.2 Analisis Pengganda (*Multiplier Analysis*)

4.2.2.1 Analisis Pengganda Output (*Output Multiplier*)

Analisis Pengganda Output ditujukan untuk mengetahui pengaruh dari adanya permintaan akhir (injeksi) terhadap peningkatan sektor itu sendiri sebagai akibat adanya dampak transfer/dampak awal (*first*), dampak indus (*indust*) amupun dampak dari konsumsi (*cons'm*).

Tabel 4.8 Koefisien Pengganda Output pada Perekonomian Kabupaten Sumenep

Sektor	Initial	First	Indust	Sederh.	Cons'm	Total
1. Sektor Pertanian	1.00	0.04	0	1.04	0.19	1.23
2. Pertamb. & Penggalian	1.00	0.01	0	1.01	0.03	1.04
3. Industri Pengolahan	1.00	0.23	0.06	1.29	0.28	1.57
4. List., Gas & Air Minum	1.00	0.21	0.05	1.26	0.30	1.55
5. Bangunan/Konstruksi	1.00	0.49	0.09	1.58	0.45	2.03
6. Perdag., Hotel, Restoran	1.00	0.16	0.03	1.19	0.30	1.48
7. Angk. & Komunikasi	1.00	0.24	0.05	1.29	0.36	1.64
8. Keuang., Persewa. & J. Perus.	1.00	0.14	0.03	1.17	0.62	1.79
9. Jasa	1.00	0.06	0.01	1.07	0.23	1.30

Sumber : data diolah (2002)

Pada tabel 4.8, terlihat bahwa berdasarkan koefisien pengganda output sederhana, sektor yang memiliki nilai tertinggi adalah sektor bangunan/konstruksi (1.58) disusul kemudian sektor industri pengolahan (1.29), sektor angkutan dan komunikasi (1.29) dan sektor listrik, gas dan air minum (1.26). Sementara berdasarkan koefisien pengganda output total, terlihat bahwa sektor yang menduduki 5 besar berturut-turut adalah : sektor bangunan (2.03), sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan (1.79), sektor angkutan dan komunikasi (1.64), sektor industri pengolahan (1.57) dan sektor listrik, gas dan air minum (1.55).

Implikasi dari nilai koefisien pengganda output ini dapat digambarkan sebagai berikut : bila terjadi perubahan permintaan akhir (injeksi) pada sektor bangunan sebesar Rp. 1 juta, maka akan terjadi kenaikan output pada sektor bangunan sebesar Rp. 1.580.000 (1.58 juta). Hal ini disebabkan oleh dampak transfer awal sebesar Rp.

490.000 (0.49 juta) dan dampak industri sebesar Rp. 90.000 (0.09 juta). Bila ditambah oleh dampak konsumsi, maka akan menghasilkan pengganda output total sebesar 1.48, yang berarti terjadi kenaikan output pada sektor ini sebesar Rp. 2.030.000,- juta atau terjadi peningkatan sebesar 103 persen. Ilustrasi ini juga dapat diterapkan pada sektor-sektor lain.

4.2.2.2 Analisis Pengganda Pendapatan (*Income Multiplier*)

Pengganda Pendapatan menunjukkan besarnya perubahan pendapatan pada masing-masing sektor sebagai dampak terjadi perubahan permintaan akhir (injeksi). Besarnya koefisien pengganda ini akan mempengaruhi langsung pendapatan yang diterima oleh masing-masing sektor.

Tabel 4.9 Koefisien Pengganda Pendapatan pada Perekonomian Kabupaten Sumenep

Sektor	Initial	First	Indust	Sederh.	Cons'm	Total	Type I	Type II
1. Sektor Pertanian	0.14	0.01	0.00	0.15	0.03	0.18	1.05	1.25
2. Pertamb. & Penggalian	0.02	0.00	0.00	0.02	0.00	0.03	1.05	1.25
3. Industri Pengolahan	0.16	0.04	0.02	0.22	0.04	0.26	1.36	1.62
4. List., Gas & Air Minum	0.18	0.04	0.01	0.23	0.04	0.28	1.26	1.50
5. Bangunan/Konstruksi	0.16	0.16	0.03	0.35	0.07	0.41	2.22	2.64
6. Perdag., Hotel, Restoran	0.18	0.04	0.01	0.23	0.04	0.28	1.26	1.50
7. Angk. & Komunikasi	0.21	0.06	0.01	0.28	0.05	0.33	1.36	1.62
8. Keuang., Persewa. & J. Perus.	0.43	0.05	0.01	0.49	0.09	0.58	1.13	1.34
9. Jasa	0.17	0.01	0.00	0.18	0.04	0.22	1.08	1.29

Sumber : data diolah (2002)

Pada tabel 4.9, terlihat bahwa dilihat dari koefisien pengganda pendapatan sederhana, sektor yang menduduki 5 besar berturut-turut adalah : sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan (0.49), sektor bangunan (0.35), sektor angkutan dan komunikasi (0.28), sektor perdagangan, hotel dan restoran (0.23) dan sektor listrik, gas dan air minum (0.23).

Berdasarkan koefisien pengganda pendapatan total yang sudah memasukkan dampak pengganda dari konsumsi, terlihat bahwa sektor yang menduduki 5 besar

masih belum berubah, yaitu berturut-turut adalah : sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan (0.58), sektor bangunan (0.41), sektor angkutan dan komunikasi (0.33), sektor perdagangan, hotel dan restoran (0.28) dan sektor listrik, gas dan air minum (0.28).

Pengganda pendapatan tipe I merupakan perbandingan antara pengganda pendapatan sederhana dengan koefisien teknis upah dan gaji rumah tangga. Berdasarkan koefisien pengganda pendapatan tipe I ini, sektor-sektor yang menduduki 5 besar adalah : sektor bangunan (2.22), sektor industri pengolahan (1.36), sektor angkutan dan komunikasi (1.36), sektor perdagangan, hotel dan restoran (1.26) dan sektor listrik, gas dan air minum (1.26). Hasil analisis pengganda pendapatan tipe I dapat diilustrasikan sebagai berikut : misalkan nilai koefisien pengganda pendapatan tipe I untuk sektor bangunan adalah sebesar 2.22, hal ini menunjukkan bahwa setiap penambahan permintaan akhir output dari sektor bangunan sebesar satu satuan rupiah akan meningkatkan pendapatan rumah tangga yang bekerja di sektor tersebut sebesar 2.23 kali.

Pengganda pendapatan tipe II merupakan pengembangan dari pengganda pendapatan total. Pengganda pendapatan tipe II suatu sektor merupakan perbandingan antara pengganda pendapatan total dengan koefisien teknis rumah tangga sektor tersebut. Berdasarkan pengganda pendapatan tipe II ini, sektor-sektor yang menduduki 5 besar berturut-turut adalah : sektor bangunan (2.64), sektor industri pengolahan (1.62), sektor angkutan dan komunikasi (1.62), sektor perdagangan, hotel dan restoran (1.50) dan sektor listrik, gas dan air minum (1.50). Implikasi dari pengganda pendapatan tipe II ini juga tidak berbeda dengan pengganda pendapatan tipe II, hanya saja pengganda ini telah memasukkan dampak pengganda konsumsi dalam perhitungannya. Ini berarti bahwa setiap penambahan permintaan akhir output dari sektor bangunan sebesar satu satuan rupiah akan meningkatkan pendapatan rumah tangga yang bekerja di sektor tersebut sebesar koefisien penggandanya.

4.2.3 Koefisien Penyebaran (*Coefficient of Dispersion*)

Koefisien Penyebaran merupakan indeks yang menunjukkan pengaruh perubahan permintaan akhir sebuah sektor sebesar satu unit terhadap sektor-sektor lain yang memberikan input pada sektor tersebut. Koefisien ini, merupakan pengembangan dari analisis keterkaitan ke belakang.

Tabel 4.10 Koefisien Penyebaran Sektor-sektor Perekonomian Kabupaten Sumenep

Sektor	Koefisien Penyebaran	Rank
1. Sektor Pertanian	1.6172	3
2. Pertamb. & Penggalian	0.3616	7
3. Industri Pengolahan	0.0292	9
4. List., Gas & Air Minum	0.2908	8
5. Bangunan/Konstruksi	0.4656	6
6. Perdag., Hotel, Restoran	0.8825	5
7. Angk. & Komunikasi	2.1461	1
8. Keuang., Persewa. & J. Perus.	1.2428	4
9. Jasa	1.9641	2

Sumber : data diolah (2002)

Pada tabel 4.10, terlihat bahwa sektor-sektor yang memiliki indeks koefisien penyebaran lebih dari satu adalah sektor angkutan dan komunikasi (2.14612), disusul kemudian oleh sektor jasa (1.96406), sektor pertanian (1.61725) dan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan (1.24280). Menurut kriteria koefisien penyebaran, sektor-sektor yang memiliki indeks koefisien penyebaran lebih dari satu merupakan sektor yang peka terhadap pengaruh sektor yang lain.

Sektor-sektor yang memiliki indeks koefisien penyebaran lebih dari satu ini merupakan sektor yang dapat menjadi prioritas sektoral dalam pengembangan wilayah Kabupaten Sumenep karena mampu mendorong sektor belakang. Perkembangan sektor-sektor ini akan menambah kebutuhan input dalam jumlah yang

cukup besar, dan karena itu mampu menaikkan kegiatan ekonomi sektor penyedia input dalam tingkat yang signifikan.

4.2.4 Kepekaan Penyebaran (*Sensitivity of Dispersion*)

Kepekaan penyebaran mengukur pengaruh perubahan satu unit permintaan akhir sebuah sektor terhadap semua sektor pengguna output (sektor depan) dalam perekonomian wilayah Kabupaten Sumenep. Sebuah sektor dikatakan memiliki pengaruh yang tinggi terhadap sektor depan dalam sebuah perekonomian wilayah bila indeks kepekaan penyebarannya lebih dari satu. Sebaliknya, bila indeks kepekaan penyebaran sebuah sektor kurang dari satu, ini berarti bahwa pengaruh sektor tersebut terhadap sektor depan dalam perekonomian wilayah relatif kecil.

Tabel 4.11 Kepekaan Penyebaran Sektor-sektor Perekonomian Kabupaten Sumenep

Sektor	Kepekaan Penyebaran	Rank
1. Sektor Pertanian	1.9878	2
2. Pertamb. & Penggalian	0.5782	6
3. Industri Pengolahan	0.1311	9
4. List., Gas & Air Minum	0.4685	7
5. Bangunan/Konstruksi	0.2195	8
6. Perdag., Hotel, Restoran	0.8334	4
7. Angk. & Komunikasi	2.3183	1
8. Keuang., Persewa. & J. Perus.	1.6927	3
9. Jasa	0.7705	5

Sumber : data diolah (2002)

Pada tabel 4.11, terlihat bahwa berdasarkan indeks kepekaan penyebaran, sektor-sektor yang memiliki angka indeks kepekaan penyebaran lebih dari satu adalah sektor angkutan dan komunikasi (2.318262), sektor pertanian (1.9878) dan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan (1.6927). Hal ini menunjukkan bahwa ketiga sektor ini merupakan sektor pemasok input utama dan memiliki pengaruh yang

cukup besar terhadap sektor-sektor di depannya. Prioritas sektoral terhadap sektor-sektor ini akan mampu mengembangkan sektor-sektor lain yang menggunakan pasokan input dari sektor-sektor ini.

4.2.5 Analisis Kebocoran Wilayah

Kebocoran wilayah dapat dilihat dari koefisien input impor yang menunjukkan besarnya penggunaan bahan baku impor dalam suatu sektor. Makin besar angka koefisien impor suatu sektor, makin besar pula kebocoran wilayah yang disebabkan oleh aliran dana ke luar wilayah untuk membayar bahan baku yang diimpor oleh suatu sektor.

Tabel 4.12 Koefisien Impor Sektor-sektor Perekonomian Kabupaten Sumenep

Sektor	Koefisien Impor	Rank
1. Sektor Pertanian	0.0133	8
2. Pertamb. & Penggalian	0.0019	9
3. Industri Pengolahan	0.0244	6
4. List., Gas & Air Minum	0.0827	2
5. Bangunan/Konstruksi	0.0548	4
6. Perdag., Hotel, Restoran	0.0594	3
7. Angk. & Komunikasi	0.0974	1
8. Keuang., Persewa. & J. Perus.	0.0233	7
9. Jasa	0.0323	5

Sumber : data diolah (2002)

Tabel 4.12 menunjukkan besarnya koefisien impor masing-masing sektor dalam perekonomian Kabupaten Sumenep. Hasil analisis menunjukkan bahwa sektor-sektor yang memiliki koefisien impor terbesar adalah sektor angkutan dan komunikasi (0.0974), disusul kemudian oleh sektor listrik, gas dan air minum (0.0827) dan sektor perdagangan, hotel dan restoran (0.0594). Tingginya koefisien impor untuk ketiga sektor ini mungkin disebabkan pasokan energi yang berasal dari

luar daerah, terutama untuk sektor angkutan dan komunikasi dan sektor listrik, gas dan air bersih. Sedangkan untuk sektor perdagangan, hotel dan restoran, penyebab utama tingginya koefisien impor diperkirakan berasal dari sektor perdagangan di mana pasokan barang di sektor ini masih berasal dari luar daerah, terutama dari kota-kota besar yang ada di Jawa Timur.

Sementara sektor yang memiliki koefisien impor terendah adalah sektor pertambangan dan penggalian (0.0019). Hal ini dikarenakan sektor ini merupakan sektor yang bersifat eksploratif dalam arti menggali kekayaan alam yang telah ada, sedangkan alat-alat produksinya telah diimpor pada saat investasi awal. Rendahnya koefisien impor untuk sektor ini tidak akan terjadi pada saat investasi awal, yang biasanya memakai alat-alat produksi berteknologi tinggi dan biasanya masih diimpor. Walaupun demikian, masih perlu dilakukan kajian untuk mengetahui tingkat kebocoran pendapatan melalui mekanisme transfer yang biasanya terjadi dalam kontrak karya pertambangan. Mekanisme transfer ini tentu saja tidak tercakup dalam impor bahan baku dalam proses produksi, namun lebih merupakan kesepakatan hukum antara pihak-pihak yang mengadakan kontrak.

Dalam kerangka pembangunan wilayah Kabupaten Sumenep, perlu dilakukan upaya untuk mengurangi ketergantungan pada bahan baku impor untuk mengurangi kebocoran wilayah akibat aliran dana keluar (*cash outflow*). Pengurangan bahan baku impor ini akan otomatis menurunkan koefisien impor, dan dana yang keluar dapat diinvestasikan atau dibelanjakan dalam wilayah Kabupaten Sumenep.

BAB V



KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil analisis dan pembahasan data, dapat disimpulkan bahwa :

1. Sektor-sektor prioritas dalam pembangunan regional di Kabupaten Sumenep berdasarkan keterkaitan ke depan adalah sektor angkutan dan komunikasi (0.76240), sektor pertanian (0.65371), sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan (0.55668). Hal ini diperkuat dengan nilai kepekaan penyebaran sektor-sektor tersebut yang memiliki nilai lebih dari satu, masing-masing untuk sektor angkutan dan komunikasi (2.3183), sektor pertanian (1.9878) dan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan (1.6927).
2. Berdasarkan kriteria keterkaitan ke belakang, sektor-sektor prioritas dalam pembangunan regional di Kabupaten Sumenep adalah sektor angkutan dan komunikasi (0.79185), sektor jasa (0.72468), sektor pertanian (0.59671) dan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan (0.45855). Hal ini diperkuat dengan nilai koefisien penyebaran lebih dari satu, masing-masing untuk sektor angkutan dan komunikasi (2.14612), disusul kemudian oleh sektor jasa (1.96406), sektor pertanian (1.61725) dan untuk sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan (1.2428).
3. Berdasarkan angka pengganda output, sektor-sektor prioritas adalah sektor bangunan (2.03), sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan (1.79), sektor angkutan dan komunikasi (1.64), sektor industri pengolahan (1.57) dan sektor listrik, gas dan air minum (1.55). Sedangkan berdasarkan pengganda pendapatan, sektor-sektor yang menonjol adalah sektor bangunan (2.64), sektor industri pengolahan (1.62), sektor angkutan dan komunikasi (1.62), sektor perdagangan, hotel dan restoran (1.50) dan sektor listrik, gas dan air minum (1.50).

4. Berdasarkan analisis kebocoran wilayah, sektor-sektor prioritas adalah sektor pertambangan dan penggalian (0.0019), sektor pertanian (0.0133) dan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan (0.0233).

5.2 SARAN

Dari kesimpulan pada 5.1, beberapa hal yang dapat disarankan dalam rangka pembangunan ekonomi wilayah Kabupaten Sumenep antara lain :

1. Hasil penelitian ini berdasarkan metode non-survey, dan sebaiknya ditindaklanjuti dengan mengadakan survey pada sektor-sektor prioritas yang telah diteliti. Survey ini juga bertujuan untuk menetapkan komoditas-komoditas prioritas dan pemetaan wilayah pengembangannya untuk lebih menfokuskan kebijakan pengembangan wilayah di Kabupaten Sumenep.
2. Perlu memperkuat jaringan transportasi dan komunikasi antar sub-wilayah, dengan membangun infrastruktur baru serta mengefektifkan penggunaan infrastruktur lama untuk memperkuat keterkaitan baik ke depan maupun ke belakang, dan sekaligus untuk mengurangi kebocoran wilayah.
3. Perlu dilakukan identifikasi kebutuhan sumber daya manusia sesuai dengan sektor-sektor prioritas yang diteliti, dan menetapkan strategi pengembangan sumber daya manusia yang tepat melalui kerjasama dengan lembaga pendidikan dan dengan menarik potensi SDM daerah yang masih ada di luar daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Sritua. 1993. *Metodologi Penelitian Ekonomi*. Jakarta : LPFE-UI
- Arsyad, Lincolin. 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Yogyakarta : BPFE
- Aziz, Iwan Jaya. 1994. *Ilmu Ekonomi Regional dan Beberapa Aplikasinya di Indonesia*. Jakarta : LPFE-UI
- Budiharsono, Sugeng. 1985. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Bogor : Institut Pertanian Bogor.
- Djojohadikusumo, Sumitro. 1991. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi : Dasar Teori dalam Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*. Jakarta : LP3ES
- Gaspersz, Vincent. 1990. *Analisis Kuantitatif untuk Perencanaan*. Bandung : Tarsito
- Husseini, Martani. 2000. Mencermati Misteri Globalisasi : Menata-Ulang Strategi Pemasaran Internasional Melalui Pendekatan Resource Based, dalam *Usahawan* No. 02 TH XXIX Februari 2000.
- Junaidi, Fafan Ari. 1997. *Analisis Keterkaitan Komoditas Pertanian dan Agroindustri di Kabupaten Daerah Tingkat II Jember*. Skripsi tidak dipublikasikan. Jember : FE-UJ
- Kuncoro, Mudradjat. 1996. Analisis Struktur, Perilaku dan Kinerja Agroindustri Indonesia : sebuah studi empiris, dalam *Kelola* No. II/V/1996.
- _____. 1997. *Ekonomi Pembangunan : Teori, Masalah dan Kebijakan*. Yogyakarta : Widyasarana Informatika.
- Muchdie. 2000. Struktur Ruang Perekonomian Indonesia : Analisis Model Input-Output Antardaerah, dalam *Jurnal Studi Indonesia* Vol. 10 No. 2 September 2000.
- Priyono, Teguh Hadi. 2000. *Analisis Dampak Pengembangan Komoditas Tembakau terhadap Perekonomian Wilayah di Kabupaten Jember*. Tesis tidak dipublikasikan. Bogor : Magister Perencanaan Wilayah Institut Pertanian Bogor.
- Saktiyanto, AM.H. 2000. *Analisis Keterkaitan Antar Sektor di Kabupaten Jember*. Skripsi tidak dipublikasikan. Jember : FE-UJ.

Sicat, G. dan H.W. Arndt. 1991. *Ilmu Ekonomi untuk Konteks Indonesia*. Jakarta : LP3ES

Sukirno, Sadono. 1985. *Ekonomi Pembangunan : Teori, Masalah dan Kebijakan*. Jakarta : LPFE-UI

Tjokromidjojo, Bintoro. 1986. *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta : Gunung Agung.

Usman, W. dan Spillane, D. 1988. *Materi Pokok Ilmu Ekonomi Regional*. Jakarta : Karunika.

Yuwono, Prapto. 1999. Penentuan Sektor Unggulan Daerah Menghadapi Implementasi UU No. 22/1999 dan UU No. 25/1999 (studi kasus di Kotamadya Salatiga), dalam *Kritis* Vol/ XII No. 2.

Lampiran 1

Klasifikasi Sektor Input Output Kabupaten Sumenep

Kode Sektor	Nama Sektor
1	Sektor Pertanian
2	Sektor Pertambangan dan Penggalian
3	Sektor Industri Pengolahan
4	Sektor Listrik, Gas dan Air Minum
5	Sektor Bangunan
6	Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran
7	Sektor Angkutan dan Komunikasi
8	Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan
9	Sektor Jasa
180	Jumlah Permintaan Antara
190	Jumlah Input Antara
201	Upah dan Gaji
202	Surplus Usaha
203	Penyusutan
204	Pajak tak Langsung netto
200	Impor
209	Nilai tambah bruto
210	Jumlah input
301	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga
302	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah
303	Pembentukan Modal Tetap
304	Perubahan Stok
305	Ekspor barang dan jasa ke luar negeri
309	Jumlah Permintaan Akhir
600	Jumlah Output

Lampiran 2

Tabel Input Output Jawa Timur 1995

Sektor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	190
1	360897	20	1599070	0	284100	556655	1030	0	50660	2852432
2	522	10740	234180	13572	506358	8	137	0	0	765517
3	545802	30679	4029546	513024	4541586	1015175	609268	193416	436501	11914997
4	8245	221	704458	159552	21861	170784	28760	37149	83730	1214760
5	32284	8556	59298	35447	10698	113331	42617	132508	39808	474547
6	199892	19704	2569024	43130	1134510	567153	109438	154293	109907	4907051
7	124331	10272	948013	22977	289235	550199	187659	218224	128921	2479831
8	144055	38797	689643	10943	338146	857730	228961	689438	153442	3151155
9	66500	13279	348570	7067	40990	122123	136195	107429	63585	905738
180	1482528	132268	11181802	805712	7167484	3953158	1344065	1532457	1066554	28666028
201	5832275	428555	3336859	259476	2676132	2947243	966442	3590643	1471877	21509493
202	4247445	245057	10649575	234569	242862	7762407	1988875	2824391	1329722	29524903
203	270441	282095	719756	104025	1163477	952698	388302	295155	134723	4310672
204	264943	98871	1286674	2168	85944	812383	95551	102660	36043	2785237
209	10615104	1054578	15992864	600238	4168415	12474731	3439170	6812840	2972365	58130305
200	520044	32051	5403068	0	0	863789	339879	0	257823	7416654
210	12617676	1218897	32577734	1405950	11335899	17291678	5123114	8345297	4296742	94212987

Sumber : BPS Propinsi Jawa Timur

301	302	303	304	305	309	600
3412135	9638	163253	1279585	4900633	9765244	53722853
39520	35672	0	51985	326203	453380	1218897
4928455	417545	2396335	1178423	11741979	20662737	32577734
177879	13311	0	0	0	191190	1405950
225618	74716	10560118	0	0	10861352	11335899
6527688	461721	882168	110808	4402242	12384627	17291678
1331623	59564	198837	47027	1006232	2643283	5123114
1902775	3291367	0	0	0	5194142	8345297
2380679	363176	576131	0	71018	3391004	4296742
20927272	4726710	14776842	2667828	22448307	65546959	94212987

Lampiran 3

Tabel Input Output Kabupaten Sumenep Tahun 2000 (dalam juta rupiah)

Sektor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	190	301	302	303	304	305	309	600
1	50353	3	142	0	25	11445	172	0	8157	70297	560360	16314	109773	184871	670592	1541910	1612207
2	346	5586	525	115	145	0	6	0	0	6723	125312	46596	7620	216368	280300	676196	682919
3	227	13	142	213	152	422	253	80	181	1683	2047	1973	1463	1489	4877	11849	13532
4	70	2	254	1354	186	1450	244	315	711	4586	1510	113	0	5726	0	7349	11935
5	47	12	874	51	15	164	62	191	58	1474	326	321	14257	0	0	14904	16378
6	3606	329	154	366	157	11661	10769	3048	2288	32378	113866	26562	86759	28978	66969	323134	355512
7	4084	312	564	195	1874	11312	19026	4312	4888	46567	43195	43340	31485	15413	37584	171017	217584
8	2219	553	254	94	4886	17635	13910	13622	2728	55901	26542	79829	0	0	2611	108982	164883
9	3864	714	145	60	592	2511	7470	2123	4264	21743	133769	38529	161369	0	33844	367511	389254
180	64816	7524	3054	2448	8032	56600	51912	23691	23275	241352	1006927	253577	412726	452845	1096777	3222852	3464204
201	225874	15366	2154	2203	2568	65271	44780	70942	65785	494943							
202	1277822	644631	2415	3991	3508	159593	76522	55803	278742	2503027							
203	10894	10521	308	1883	547	29587	18734	6832	6406	85712							
204	12157	3599	5345	625	1266	26702	9494	4328	3235	66751							
200	20644	1278	256	785	457	17759	16142	3287	11811	72419							
209	1547391	675395	10478	9487	8346	298912	165672	141192	365979	3222852							
210	1612207	682919	13532	11935	16378	355512	217584	164883	389254	3464204							



Sumber :Lampiran 2 (diolah dari hasil perhitungan GRIMP 7)